

SKRIPSI

STUDI PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI *GAMPONG KUTA BARAT KOTA SABANG*



Disusun Oleh:

**REZA FAHLEVI
NIM. 150602192**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M /1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Reza Fahlevi
NIM : 150602192
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mepertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data..*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Januari 2020

Yang Menyatakan,


Reza Fahlevi

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi
Islam dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Gampong Kuta Barat Kota Sabang.**

Disusun Oleh:

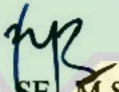
Reza Fahlevi

NIM. 150602192

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

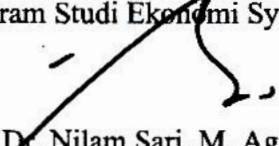
Pembimbing I

Pembimbing II


Cut Dian Fitri, SE., M.Si. Ak. CA
NIP. 198307092014032002


Hafiizh Maulana, SP., S.H.I., ME
NIDN. 2006019002

Mengetahui Ketua
Program Studi Ekonomi Syariah 


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Reza Fahlevi
NIM. 150602192

Dengan Judul:

Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Kuta Barat Kota Sabang

Telah Diseminarkan oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata I dalam bidang
Ekonomi Syari'ah

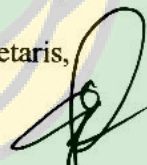
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 8 Januari 2020 M
12 Jumadal Awwal H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

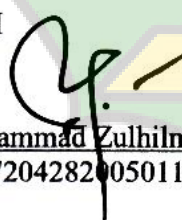
Sekretaris,

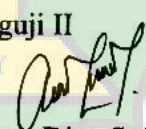

Cut Dian Fitri, SE., M.Si. Ak. CA
NIP. 198307092014032002


Hafiih Mulana, SP., S.H.I., ME
NIDN. 2006019002

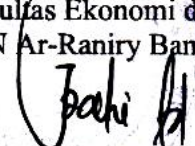
Penguji I

Penguji II


Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA
NIP. 197204282005011003


Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Reza Fahlevi

NIM : 150602192

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : freza093@gmail.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

yang berjudul:

Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Kuta Barat Kota Sabang

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 8 Januari 2020

Mengetahui,

Penulis-

Pembimbing I

Pembimbing II


Reza Fahlevi


Cut Dian Fitri, SE., M.Si. Ak. CA


Hafizh Maulana, SP., S.Hi., M.E

NIM. 150602192

NIP. 198307092014032002

NIDN. 2006019002

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di *Gampong Kuta Barat Kota Sabang*”**. Shalawat dan salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. terselesaikannya penelitian hingga penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan serta partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II dan Dr. Aniliansyah, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak. CA selaku ketua dan sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D, selaku ketua Laboratorium dan Rina Desiana, ME selaku dosen perwakilan Prodi Ekonomi Syariah di Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., MA selaku penguji I dan Winny Dian Safitri, S.Si., M.Si selaku penguji II, yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi.
6. Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak. CA selaku dosen pembimbing I dan Hafizh Maulana, SP., S.H.I., M.E selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan pencerahan dan pengarahan yang begitu berharga bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
8. Seluruh dosen pengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmu yang berharga bagi penulis.
9. Segenap Staff Layanan Administrasi Terpadu dan Staff Perpustakaan Taman Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry atas pelayanan dan bantuan yang berharga dalam pembuatan skripsi ini.
10. Segenap Staff Kantor *Keucik Gampong* Kuta Barat Kota Sabang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait penelitian yang penulis lakukan.
11. Yang paling utama penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Drs. Maiduhar dan Murniati yang sudah berjuang membiayai keperluan perkuliahan hingga selesai. Dan kedua saudara kandung Maulidita Agustina, S.TP dan Muhammad Haikal serta seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan, semangat dan juga tak henti-hentinya mendoakan penulis, semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat-Nya.
12. Seluruh teman seperjuangan di Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Terima kasih

penulis ucapkan sebesar-besarnya kepada Aditya Putra Pratama, SE yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

13. Teman-teman Asrama Putra Sabang terutama Satria, Kun, Rizki, Rafdi dan Bayu yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknik penyusunan. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaanya.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini. Semoga Allah SWT. Senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Aamiin Yarabbal'alamiin.

Banda Aceh, 8 Januari 2020
Penulis,

Reza Fahlevi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl/ raudatulatfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Talhah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. حماد بن سليمان
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Reza Fahlevi
NIM : 150602192
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Gampong Kuta Barat Kota Sabang
Tanggal Sidang : 8 Januari 2020
Tebal Skripsi : 114
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak. CA
Pembimbing II : Hafiizh Maulana, SP., S.HI., ME

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah fakir miskin tertinggi untuk Kecamatan Suka Karya yang berada di *Gampong* Kuta Barat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kemiskinan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan skala *likert*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; variabel '*adl*' (X1) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y), variabel transparansi (X2) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y), variabel *ma'ad* (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y), variabel '*adl*' (X1), variabel transparansi (X2) dan variabel *ma'ad* (X3) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y).

Kata Kunci: '*Adl*, Transparansi, *Ma'ad*, Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
LEMBAR TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 12
2.1 Teori Desentralisasi Fiskal.....	12
2.2 Desa dalam Kajian Literatur	13
2.2.1 Skema Penyaluran Dana Desa.....	15
2.2.2 Tujuan dan Manfaat Dana Desa.....	16
2.3 Prinsip Pengelolaan Dana Desa.....	16
2.3.1 Transparansi	16
2.3.2 Akuntabilitas	17
2.3.3 Partisipasi	18
2.4 Keuangan Islam.....	18

2.5 Teori Kesejahteraan Islam	19
2.6 Bangunan Dasar Ekonomi Islam.....	22
2.7 Penelitian Terdahulu.....	28
2.8 Kerangka Pemikiran	38
2.9 Pengembangan Hipotesis	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Lokasi Penelitian.....	40
3.2 Jenis Penelitian.....	41
3.3 Tahapan Penelitian.....	41
3.4 Sumber Data	42
3.5 Populasi dan Sampel Penelitian	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.7 Variabel Penelitian dan Definisi Operasionalisasi Variabel.....	44
3.7.1 Variabel Penelitian	44
3.7.2 Definisi Operasionalisasi Variabel	46
3.8 Skala Pengukuran.....	48
3.9 Uji Instrumen Penelitian.....	50
3.9.1 Validitas.....	50
3.9.2 Reliabilitas.....	51
3.10 Uji Asumsi Klasik.....	51
3.10.1 Uji Normalitas.....	52
3.10.2 Heteroskedastisitas	53
3.10.3 Multikolinieritas	53
3.11 Metode Analisis Data	54
3.12 Pembuktian Hipotesis.....	55
3.12.1 Uji Parsial (Uji T).....	55

3.12.2 Uji Simultan (Uji F)	56
3.12.3 Uji R^2 (Koefisien Determinasi)	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
4.1.1 Kondisi Ekonomi.....	60
4.1.2 Kondisi Demografi Gampong Kuta Barat	61
4.2 Gambaran Umum Anggaran Pendapatan Belanja Gampong.....	63
4.2.1 Peningkatan Dana Desa Gampong Kuta Barat tahun 2015-2019.....	64
4.3 Karakteristik Responden	65
4.4 Deskriptif Statistik	70
4.5 Uji Instrumen Penelitian	72
4.5.1 Uji Validitas	72
4.5.2 Uji Reliabilitas	73
4.6 Uji Asumsi Klasik.....	74
4.6.1 Uji Normalitas.....	74
4.6.2 Heterokedastisitas	77
4.6.3 Multikolinieritas.....	78
4.7 Hasil Regresi Linier Berganda	79
4.8 Pembuktian Hipotesis.....	80
4.8.1 Uji Parsial (Uji T).....	80
4.8.2 Uji Simultan (Uji F)	81
4.9 Uji R-Square (R^2).....	83
4.10 Pembahasan.....	84
4.10.1 Pengaruh ' <i>Adl</i> Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Gampong Kuta Barat Kota Sabang	84

4.10.2 Pengaruh Transparansi Thadap Kesejahteraan Masyarakat Gampong Barat Kota Sabang.....	85
4.10.3 Pengaruh <i>Ma'ad</i> Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Gampong Barat Kota Sabang.....	86
4.10.4 Pengaruh ' <i>Adl</i> , Transparansi <i>Ma'ad</i> Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Gampong Barat Kota Sabang	86
BAB V PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Alokasi Dana Desa Periode 2016-2017 (Ribuan)	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 3.1	Definisi dan Operasionalisasi Penelitian	46
Tabel 3.2	Item Instrumen yang Menggunakan Skala <i>Likert</i> ..	49
Tabel 3.3	Skala Pengukuran Responden (Skala <i>Likert</i> 1-5) ..	49
Tabel 4.1	Jumlah Jurong, Aneuk Jurong dan Kepala Pemuda Gampong Kuta Barat	60
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Gampong Kuta Barat Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
Tabel 4.3	Profesi dan Pekerjaan Masyarakat Gampong Kuta Barat	62
Tabel 4.5	APBG Gampong Kuta Barat Tahun 2019	63
Tabel 4.6	Karakteristik Jawaban Responden.....	70
Tabel 4.7	Uji Validitas.....	72
Tabel 4.8	Uji Reliabilitas	74
Tabel 4.9	Uji Kolmogorov Smirnov	75
Tabel 4.10	Multikolinieritas	78
Tabel 4.11	Analisis Linier Berganda	79
Tabel 4.11	Uji Parsial (Uji T)	80
Tabel 4.12	Uji Simultan (Uji F).....	83
Tabel 4.13	Uji R-Square	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema Penyaluran Dana Desa.....	15
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	38
Gambar 4.1	Peningkatan Dana Desa Gampong Kuta Barat Tahun 2015-2019	64
Gambar 4.2	Grafik Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	65
Gambar 4.3	Grafik Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	66
Gambar 4.5	Grafik Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	67
Gambar 4.6	Grafik Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	68
Gambar 4.7	Grafik Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Pengalaman Menjadi Perangkat Gampong	69
Gambar 4.8	Grafik Histogram.....	75
Gambar 4.9	Grafik Normal P-Plot	76
Gambar 4.10	Scatterplot.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	95
Lampiran 2 Skor Hasil Penelitian.....	99
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	100
Lampiran 4 Output SPSS.....	101
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	115



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Membangun merupakan sebuah cara untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Indonesia dalam melaksanakan pembangunannya tidak boleh hanya bergantung pada kerjasama dengan negara sahabat, akan tetapi juga perlu memaksimalkan potensi dalam negeri. Dalam memaksimalkan potensi dalam negeri, Indonesia pernah menggunakan sistem pembangunan yang dimana pemerintah pusat menentukan arah dan semua aspek dalam pembangunan Indonesia (sentralistik). Kelemahan paling besar dalam sistem ini adalah terpusatnya ekonomi di Pulau Jawa, khususnya Jakarta (Noviades, 2013). Seperti pembangunan jalan secara terus-menerus hingga pinggiran kota.

Berbeda dengan daerah ibu kota, daerah lainnya hanya memiliki infrastruktur yang seadanya. Hal ini menjadi alasan para investor baik dari dalam maupun luar negeri lebih memilih daerah ibukota sebagai tempatnya berinvestasi dibandingkan dengan daerah lainnya. Timpangnya pengelolaan keuangan ini juga dapat memicu urbanisasi masyarakat daerah. Dengan adanya sistem sentralistik, masyarakat daerah kurang menikmati hasil dari pembangunan. Masyarakat menuntut adanya keadilan dalam pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Namun setelah diberlakukannya UU No. 22/1999 (kemudian menjadi UU No 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah

dan UU No. 25/1999 (kemudian menjadi UU No. 33/2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka semuanya berubah. Dampak dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut adalah menyadarkan kita bahwa sistem sentralistik kurang menguntungkan bagi daerah. Selain itu pemerintahan daerah juga perlu mandiri dan bertumpu atas pengembangan potensi lokal. Kemandirian tersebut harus dimulai dari bagian terkecil dari pemerintahan nasional. Bagian terkecil tersebut adalah desa/kelurahan. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten/kota yang secara nyata memiliki permasalahan yang lebih luas dan rumit (Setianingsih, 2017).

Masyarakat desa menjadi fokus penting dalam pembangunan pemerintah. Karena sebagian besar wilayah Indonesia berada di daerah pedesaan. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi, politik yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan serius dari pemerintah (Tangkumahat, dkk, 2017). Pemerintah perlu menaruh perhatian yang besar terhadap daerah pedesaan agar dapat mengatasi ketimpangan pembangunan nasional. Sebagai wujud dari perhatian pemerintah maka lahirlah UU No. 6/2014 tentang Desa. Dengan adanya UU ini kedudukan desa menjadi lebih kuat. Dalam hal ini, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan

desa (Aziz, 2016). Untuk menjalankan itu semua maka pemerintah desa membutuhkan dana yang bersumber dari pendapatan desa. Tujuannya agar pemerintah desa dapat bekerja dengan baik sehingga tercapainya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada tahun 2015 pemerintah memberikan Dana Desa sesuai dengan diterbitkannya UU No. 6/2014 tentang Dana Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Sebelum adanya anggaran Dana Desa, setiap desa sudah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) namun jumlahnya tergolong kecil karena hitungan ADD didapat dari pembagian dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Tangkumahat, dkk, 2017). Maka dari itu, untuk pembangunan fisik tidak terlihat adanya perkembangan karena ADD juga dibagi untuk membiayai operasional, kegiatan fisik dan non fisik.

Dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 8/2016 dijelaskan bahwa: “Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Program Dana Desa ini adalah realisasi dari program pemerintah

Indonesia untuk membangun serta memperkuat daerah pinggiran. Sesuai dengan UU No. 6/2014 Tentang Dana Desa, tujuan dari adanya dana desa adalah sebagai berikut: 1) meningkatkan pelayanan publik di desa, 2) mengentaskan kemiskinan, 3) memajukan perekonomian desa, 4) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, 5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan desa. Dengan adanya dana desa diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemerataan pembangunan. Agar manfaat pembangunan juga dinikmati oleh masyarakat di daerah yang tertinggal.

Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota merupakan perangsang bagi masyarakat desa agar mandiri dalam membangun wilayahnya. Demi mencapai kemaslahatan, dalam melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat harus diikuti oleh masyarakat itu sendiri sebagai bagian dari desa, baik itu dari perencanaan hingga pengawasan. Masyarakat berhak mengetahui kemana dana tersebut dialokasikan.

Dan mereka juga berhak melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa agar dana desa yang digunakan tidak disalahgunakan dan dialokasikan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam memanfaatkan dan mengelola dana desa dibutuhkan kemampuan organisasi dan infrastruktur desa yang kuat. Semua itu dibutuhkan agar desa tidak terus tertinggal dan dapat berkembang. Hal ini sangat berpengaruh

besar bagi masyarakat dalam menumbuhkan lingkungan ekonomi yang baik dan juga meningkatkan kesejahteraan hidup.

ICW dalam Outlook Dana Desa 2018 mengatakan bahwa korupsi yang terjadi di desa terdapat total 154 kasus. Tidak semua dari 154 kasus korupsi di sektor desa di atas merupakan korupsi anggaran desa. Jumlah kasus dengan objek anggaran desa mencapai 127 kasus, sementara turut terdapat 27 kasus dengan objek non-anggaran desa atau total 18% dari jumlah kasus. Kasus dengan objek non-anggaran desa misalnya pungutan liar yang dilakukan oleh aparat desa. Sedangkan objek korupsi anggaran desa mencakup korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa, dan lain-lain.

Hal ini terjadi karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Untuk mencapai tujuan dana desa, tentunya dana harus dikelola dengan baik. Dana yang disalurkan seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu: *tauhid*, *'adl*, *nubuwwah*, *khilafah* dan *ma'ad*. Agar dana tersebut dapat didistribusikan secara adil dan tidak terdapat penyelewengan di dalamnya. Jika dana tersebut tidak didistribusikan secara adil dan terjadi penyelewengan didalamnya, otomatis pembangunan desa akan terhambat. Maka dari itu perlunya diterapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam proses pengelolaan dan pendistribusian tersebut.

Tabel 1.1
Rincian Alokasi Dana Desa
Periode 2016-2017 (Ribuan)

No	Nama Daerah	Rincian Dana Desa	
		2016	2017
1	Provinsi Aceh	Rp3.829.751.986.000	Rp4.892.571.795.000
2	Kota Sabang	Rp13.626.941.000	Rp17.288.363.000

Sumber : Rincian Alokasi Dana Desa (Kemenkeu, 2018)

Tabel diatas memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan jumlah dana desa yang dialokasikan untuk Provinsi Aceh yaitu sebesar Rp. 3,82 triliun rupiah. Bila dibagi rata, setiap desa menerima Rp 591 juta rupiah. Tahun 2017 jumlahnya meningkat lagi menjadi Rp. 4,89 triliun rupiah. Dengan dana desa yang besar tersebut seharusnya bisa menurunkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh secara signifikan serta memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada pengrajin, usaha mikro dan kecil, petani, nelayan tradisional dan lainnya. Sebagaimana diketahui, meski jumlah dana yang masuk ke Provinsi Aceh banyak, akan tetapi provinsi ini masih menduduki peringkat teratas dalam soal kemiskinan.

Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah dana desa yang dialokasikan untuk Kota Sabang yaitu sebesar Rp. 13,6 miliar dan di tahun 2017 sebesar Rp. 17,2 miliar. Tahun 2017, empat dari 18 *Gampong* di Kota Sabang yaitu salah satunya adalah *Gampong* Kuta Barat yang berada di Kecamatan Sukakarya mendapatkan alokasi dana bantuan desa. Dana Bandes yang didapatkan *Gampong* Kuta Barat sebesar Rp.

1,137 miliar rupiah. Dana yang disalurkan tersebut diharapkan tidak disalahgunakan. Inilah yang menjadi perhatian penulis, dimana banyaknya dana desa dan bantuan yang diberikan kepada *Gampong* Kuta Barat belum dapat mensejahterakan masyarakat *gampong*. Hal tersebut terlihat dari tingkat jumlah fakir miskin tertinggi untuk Kecamatan Suka karya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kemiskinan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan.

Dalam penelitiannya, Aziz (2016) menyebutkan bahwa keberadaan Dana Desa yang telah disalurkan sejak tahun 2016 masih belum dirasakan manfaatnya secara optimal bagi efektivitas penggunaan DD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan usaha dan kerja keras semua pihak mulai dari pemerintah (kemendagri, kemenkeu, kemendes) dan pemda kabupaten/kota serta pemerintah desa beserta masyarakat desa untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan desa, utamanya melalui BPD. Berbeda dengan Tangkumahat, dkk (2017), yang menyebutkan bahwa perekonomian masyarakat di Kecamatan Pineleng meningkat setelah adanya program Dana Desa. Ini disebabkan dengan adanya peningkatan infrastruktur berupa pembangunan jalan-jalan pertanian maka akses untuk pengangkutan dari lokasi perkebunan lebih mudah sehingga mempercepat proses penjualan hasil-hasil pertanian.

Dewasa ini, dana desa digunakan hanya sebatas untuk pembangunan fisik, padahal pembangunan non-fisik juga

diperlukan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 60/2014 pasal 2 Tentang Dana Desa disebutkan bahwa dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan, peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dari semua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, untuk merasakan manfaat secara optimal dari penggunaan Dana Desa, maka diperlukan usaha dan kerja keras dari unsur-unsur pemerintahan dan juga seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, pasar, pertanian dan irigasi memang dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat namun pembangunan non-fisik seperti pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan dan pendidikan juga diperlukan guna terdapat keseimbangan antara pembangunan fisik dan non-fisiknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut bagaimanakah prinsip pengelolaan dana desa dalam perspektif Islam berdasarkan tiga bangunan dasar ekonomi Islam yaitu *'adl*, transparansi, *ma'ad* dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan maka permasalahan yang timbul adalah:

1. Bagaimana pengaruh penerapan prinsip '*adl*' dalam pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat?
3. Bagaimana penerapan prinsip *ma'ad* dalam pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat?
4. Bagaimanakah pengaruh prinsip '*adl*', transparansi dan *ma'ad* secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aktivitas pengelolaan dana desa di *Gampong Kuta Barat* dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui pengaruh prinsip-prinsip pengelolaan dana desa secara Islami terhadap kesejahteraan masyarakat *Gampong Kuta Barat*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi kantor *keuchik Gampong Kuta Barat* dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi akademisi dan mahasiswa hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi mengenai pengaruh prinsip-prinsip pengelolaan dana desa secara Islami terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi peneliti lainnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh prinsip-prinsip pengelolaan dana desa secara Islami terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum penelitian diantaranya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan landasan teori yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu studi prinsip pengelolaan dana desa dalam perspektif Islam dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di *Gampong Kuta Barat*.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai rancangan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, variabel penelitian, populasi dan sampel dan teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dan pembahasan dari hasil penelitian studi prinsip pengelolaan dana desa dalam perspektif

Islam dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di *Gampong* Kuta Barat.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari isi pokok penelitian yang terdiri atas kesimpulan dan saran dari hasil dan pembahasan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Desentralisasi Fiskal

Kebijakan fiskal ditentukan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan cara mengubah besarnya penetapan pajak kepada para wajib pajak yang pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh wajib pajak dan pemungutan dan pengawasannya dilakukan oleh aparat pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan (Sudirman, 2011:1-2).

Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi dan pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan terjadinya pelimpahan sebagian kewenangan terhadap sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintahan di daerah, diharapkan daerah-daerah akan dapat melaksanakan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan meningkatkan investasi yang produktif di daerahnya (Suwandi, 2015:24).

Menurut Bird dan Vaillancourt dalam Suwandi (2015:24), desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang

lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik, sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa “Konsekuensi dari pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan.” Untuk merealisasikan ketentuan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah menggantikan UU Nomor 32 Tahun 1956 (Suwandi, 2015:24).

2.2 Dana Desa dalam Kajian Literatur

Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Nurcholis, 2011:1). Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah desa. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan

oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN (Nurcholis, 2011:81).

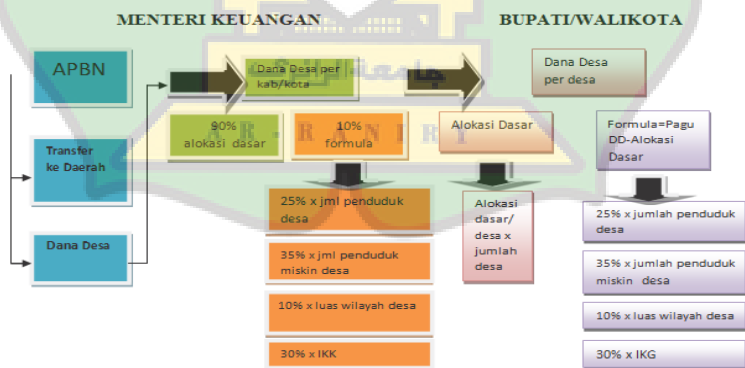
Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 Undang-undang desa bersumber dari:

- a. pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pemerintah desa sebagai pemegang otoritas dalam mengelola keuangan desa wajib mengelolanya sesuai Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yang terdapat dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.2.1 Skema Penyaluran Dana Desa

Skema pengalokasian Dana Desa menggunakan alokasi dasar sebesar 90% merata untuk semua desa pada kabupaten/kota (alokasi minimal yang diterima oleh desa secara merata di kabupaten/kota). Alokasi formula sebesar 10% didistribusikan ke desa secara proporsional berdasarkan 4 (empat) indikator yakni jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Namun, khusus untuk daerah pemekaran apabila data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, dan luas wilayah desa yang belum tersedia datanya dapat menggunakan data desa induk secara proporsional. Sedangkan untuk data tingkat kesulitan geografis dapat menggunakan data yang sama dengan desa induk atau data yang bersumber dari pemda. Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi (Aziz, 2016).



Sumber: Kementerian Keuangan (2016)

Gambar 2.1
Skema Penyaluran Dana Desa

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Dana Desa

Dana Desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014, prioritas pemanfaatan dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan (Meutia dan Liliana, 2017).

2.3 Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Penyaluran Dana Desa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Seiring dengan mengalami peningkatan, pemerintah desa dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang besar pula. Dalam pengelolaannya, Dana Desa harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi maupun efisiensi. Prinsip-prinsip tersebut diperlukan demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berikut ini akan dijelaskan tiga prinsip utama tersebut.

2.3.1 Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan dimana semua kegiatan pemerintahan dikelola secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa yang jujur dan benar. Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui

sejumlah indikator seperti berikut: 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik; 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik; 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani (Astuti dan Yulianto, 2016:).

2.3.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara legal. Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
- b) harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- d) harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;

- e) harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP 2000).

2.3.3 Partisipasi

Partisipasi yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang melibatkan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang (Astuti dan Yulianto, 2016).

2.4 Keuangan Islam

Keuangan Islam tidak terlepas kaitannya dengan keuangan publik. Di mana, keuangan publik hadir sebagai solusi atas kegagalan pasar. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah di dalamnya. Umer Chapra berpendapat bahwa, negara tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan intervensi manakala perbatasan keadilan dan kejujuran telah dilanggar dan tak ada justifikasi untuk menunggu sampai kekuatan-kekuatan pasar mampu mengoreksi sendiri ketimpangan yang ada. Kendatipun begitu, intervensi demikian tidak dilakukan secara membabi buta, karena justru hal ini bisa menimbulkan ketimpangan. Justru ini harus dilakukan

berdasarkan analisis yang memadai yang dilakukan oleh para ahli dan jika harga diregulasi karena hal tertentu yang diperbolehkan, maka hal itu jangan sampai melebihi batas harga dari barang-barang demikian pada saat keadaan sedang normal (Huda, dkk, 2015:35).

Negara juga harus dapat menjamin setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi. Agar keadilan dapat tercapai, maka negara bisa mengalokasikan pemanfaatan sumber daya sesuai dengan tingkat kepentingan dan ketersediaan sumber daya ekonomi yang dimiliki suatu negara (Huda, dkk, 2012:50).

Jika sumber daya ekonomi sudah didistribusikan dan dialokasikan secara adil, maka tugas negara selanjutnya adalah menjaga supaya keadaan tersebut dapat berlangsung dalam waktu berkelanjutan secara konsisten. Jika hal ini tidak dijalankan, maka akan terbuka peluang terjadinya ketidakstabilan perekonomian. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas ekonomi, negara harus memiliki instrumen yang adil dan tepat, sehingga gejolak perekonomian dapat dihindari (Huda, dkk, 2012:51-52).

2.5 Teori Kesejahteraan Islam

Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Sedangkan menurut Sodik (2015), kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa

takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.

Selanjutnya, Sunarti dalam Sodiq (2015) menjelaskan bahwa aspek-aspek spesifik yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat adalah: *Pertama*, Kependudukan, yang meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, migrasi dan fertilitas. *Kedua*, Kesehatan, yang meliputi tingkat kesehatan masyarakat (angka kematian bayi, angka harapan hidup dan angka kematian), ketersediaan fasilitas kesehatan, serta status kesehatan ibu dan balita. *Ketiga*, Pendidikan, yang meliputi kemampuan baca tulis, tingkat partisipasi sekolah dan fasilitas sekolah.

Keempat, Ketenagakerjaan, yang meliputi tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan, jam kerja dan pekerjaan anak. *Kelima*, Pola konsumsi dan tingkat konsumsi rumah tangga, yang meliputi distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga (makanan dan non-makanan). *Keenam*, Perumahan dan lingkungan, yang meliputi kualitas rumah (tempat tinggal), fasilitas lingkungan perumahan dan kebersihan lingkungan. *Ketujuh*, Sosial budaya, yang meliputi akses untuk memperoleh informasi dan hiburan, dan kegiatan sosial budaya.

Sodiq (2015), menjelaskan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khalik (bertaqwa kepada Allah Swt.), dan

juga berbicara yang jujur dan benar, serta Allah Swt. Juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah Swt. Maupun kuat dalam hal ekonomi.

Menurut Umer Chapra dalam Sodik, (2015), menjelaskan bahwa ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Al-Quran telah menyinggung tentang kesejahteraan dalam Surat An-Nahl ayat 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. An-Nahl: 97).

Dalam surat diatas Allah Swt. Telah menjanjikan bahwa siapapun yang mengerjakan kebaikan akan diberikan kehidupan yang baik. Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik disini adalah memperoleh rezeki yang halal dan juga baik. Kehidupan yang baik juga dapat diartikan sebagai kehidupan yang aman dan juga tentram, baik secara lahiriyah maupun batiniyah. Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan mengerjakan amal shaleh.

2.6 Bangunan Dasar Ekonomi Islam

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni *tauhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (hasil). Kelima dasar inilah yang dijadikan dasar untuk membangun teori-teori ekonomi Islam (Khoir, 2015).

1. Prinsip *Tauhid* (keimanan)

Muhammad dan Adiwarmān Azwar Karim dalam Suadi (2018:8), berpendapat bahwa bentuk konkret nilai ketuhanan dalam Islam adalah tauhid, yang merupakan fondasi fundamental ajaran Islam. *Tauhid* menyadarkan manusia sebagai makhluk *illahiyyah*, sosok makhluk yang bertuhan. Artinya, setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhidi* (Lubis, 2015). Semua kegiatan manusia diawasi oleh Allah Swt. Tak terkecuali kegiatan ekonomi. Nilai dasar ekonomi yang berfalsafah *tauhid* terlihat antara lain pada konsep kepemilikan (*ownership*) dan keseimbangan (*equilibrium*). Konsep kepemilikan

(ownership) dalam ekonomi Islam terletak pada pemanfaatannya bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, berbeda dengan konsep kapitalis dimana terdapat kepemilikan mutlak individu terhadap sumber ekonomi (Idri, 2015: 22). Sedangkan dalam Islam pemilik mutlak atas segala sumber daya ekonomi hanyalah Allah Swt. Manusia hanya memiliki hak untuk mengelolanya bukan untuk memilikinya secara penuh. Seperti yang terdapat dalam firman Allah:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah: 284).

2. Prinsip 'Adl (keadilan)

Menurut Adiwarman Azwar Karim dalam Idri (2015: 29), nilai keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Kata adil dalam hal ini bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata sama rasa. Tentunya ini sangat

berbeda dengan konsep adil dalam kapitalisme dan sosialisme. Adil dalam kapitalisme adalah apa yang diusahakan maka itulah yang dia dapatkan. Di dalam konsep kapitalisme, kekayaan adalah wujud atas hasil kerja keras dan usahanya orang kaya. Sebaliknya, kemiskinan adalah wujud atas upayanya orang miskin. Maka dari itu, dalam kapitalisme bukan hak orang kaya untuk memperhatikan orang miskin dan juga bukan hak orang miskin untuk meminta perhatian dari orang kaya karena semua yang dia dapatkan diukur berdasarkan hasil dari usahanya sendiri. Berbanding terbalik dengan sosialisme, kekayaan didistribusikan sama rata. Tidak ada yang memiliki kekayaan lebih besar dibandingkan yang lain. Hal ini tentu berbeda dengan konsep adil dalam ekonomi Islam. Orang kaya berhak atas kekayaannya yang dia dapatkan dari usahanya selama tidak menzalimi orang lain. Namun, kekayaan yang dia usahakan tersebut didalamnya terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan. Apabila tidak dikeluarkan maka dia disebut tidak adil.

Menurut M. Umer Chapra dalam Idri (2015: 31), keadilan dalam bidang ekonomi menyangkut empat hal, yaitu *need fulfilment* (pemenuhan kebutuhan), *respectable source of earning* (sumber penghasilan yang terhormat), *equitable distribution of income and wealth* (distribusi penghasilan dan harta yang berkeadilan), dan *growth and stability* (perkembangan dan stabilitas).

3. Prinsip *Nubuwwah* (kenabian)

Nubuwwah (kenabian) merupakan sifat yang diberikan Allah kepada manusia pilihan-Nya karena memiliki keistimewaan dan kemampuan khusus yang tidak dimiliki manusia lain berupa wahyu dan mukjizat yang membuktikan kebenaran ajaran yang mereka bawa (Idri, 2015: 26). Di dalam *nubuwwah* terdapat empat nilai yang merupakan sifat wajib nabi. Empat nilai yang merupakan sifat wajib nabi ini layak untuk diterapkan oleh muslim dalam aktivitas sehari-harinya tak terkecuali dalam aktivitas ekonomi.

Keempat nilai tersebut yaitu *shiddiq* (benar dan jujur), amanah (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan) dan *fathanah* (cerdas). *Shiddiq* adalah setiap yang disampaikan oleh nabi adalah benar. Tidak mungkin seorang nabi berbohong dalam menyampaikan wahyu. Kebenaran dan kejujuran nabi mencakup jujur dalam niat, jujur dalam maksud, jujur dalam perkataan dan jujur dalam tindakan. Dalam bidang ekonomi sifat ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang berupa integritas kepribadian, keseimbangan emosional, nilai-nilai etis berupa jujur, ikhlas, kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah bisnis secara tepat dan sebagainya (Idri, 2015: 27-28). Amanah adalah dapat diberi kepercayaan dan dapat bertanggung jawab, transparan serta tepat waktu. *Tabligh*, yaitu dapat bekerja dalam tim, memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang baik dan lainnya. *Fathanah* yaitu memiliki kemampuan berfikir yang cepat, sehingga

dapat dengan mudah memahami dan menangkap maksud dari suatu keadaan. Serta memiliki visi dan kepemimpinan yang baik.

4. Prinsip *Khilafah* (pemerintahan)

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah telah diamanahkan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Manusia diberi tugas untuk memelihara dan melestarikan alam, menggali, mengelola, dan mengolah kekayaan alam untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan segenap manusia dalam rangka beribadah kepada Allah. Penunjukan manusia sebagai khalifah di muka bumi terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."(Q.S. Al-Baqarah: 30).

Untuk mewujudkan tugas yang mulia tersebut, manusia selama hidup di dunia diwajibkan meningkatkan kemampuannya baik fisik maupun rohaninya kearah yang lebih maju baik dalam

bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi. Dalam menjalankan tugas hidupnya manusia diharuskan menjauhi sifat-sifat yang buruk yang menjadi penyebab kerusakan tata hubungan antara manusia seperti pertumpahan darah maupun kerusakan alam. Oleh karena itu senantiasa manusia dianjurkan selalu ingat kepada Allah Swt. dengan berzikir, bertasbih, serta berbuat yang ma'ruf dan mencegah diri dari perbuatan yang mungkar.

Menurut M. Umer Chapra dalam Idri (2015: 29) ada empat faktor yang terkait dengan *khilafah* dalam hubungannya dengan ekonomi Islam, yaitu *universal brotherhood* (persaudaraan universal), *resource are a trust* (sumber daya alam merupakan amanat), *humble life style* (gaya hidup sederhana), dan *human freedom* (kemerdekaan manusia). Faktor-faktor tersebut merupakan pilar dari *khilafah* yang menjadi kendaraan untuk mencapai *falah*.

5. Prinsip *Ma'ad* (hasil)

Karakteristik ekonomi Islam mengakui ada dua tujuan yang harus dicapai selaku pelaksana ekonomi yaitu tujuan hidup di dunia (*profit oriented*) dan akhirat (*falah oriented*). Segala bentuk aktivitas ekonomi harus mempunyai nilai ganda tersebut dan berimplikasi kepada keseriusan berusaha karena adanya tanggung jawab dunia akhirat itu (Suadi, 2018: 14). Dunia merupakan tempat bagi manusia untuk mengumpulkan bekal akhirat kelak. Jika manusia semasa hidupnya senantiasa berbuat baik maka dia akan mendapatkan balasan yang baik juga dan begitupun sebaliknya. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Suadi (2018: 14) menjelaskan

bahwa, implikasi konsep *ma'ad* dalam kehidupan ekonomi dan bisnis, misalnya mendapatkan profit/laba sebagai motivasi para pelaku bisnis. Laba tersebut bisa didapatkan di dunia dan bisa juga kelak akan diterima di akhirat.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi pendukung penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi referensinya antara lain dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis, disertasi ataupun artikel-artikel yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa dalam perspektif Islam dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tangkumahat, dkk (2017), dalam penelitiannya mengenai dampak program dana desa terhadap peningkatan pembangunan dan ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kebijakan Dana Desa, khususnya pada proses penerapan Dana Desa dari perencanaan, pencairan, penggunaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Hasil penelitian menunjukkan program dana desa di Kecamatan Pineleng berjalan cukup baik, namun untuk perlu adanya peningkatan kapasitas dan skill dari aparatur pemerintah desa dalam rangka mendukung pelaksanaan program ini guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Setianingsih (2017), dalam penelitiannya mengenai kontribusi Dana Desa dalam menurunkan angka kemiskinan di

Kabupaten Melawi dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa untuk pembangunan desa berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap angka kemiskinan. Sedangkan dana desa untuk pembinaan kemasyarakatan desa dan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif.

Sari dan Abdullah, (2017), dalam penelitian analisis ekonomi kebijakan Dana Desa terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini bersifat explanatory. Hasil penelitian menunjukkan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2015-2016 serta terjadi perbedaan kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung antara Tahun 2015 dengan 2016.

Maulana (2018) Peran dana desa dalam memberdayakan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam (studi kasus di desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian pengolahan dana desa yang ada di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab Lampung Selatan, berjalan dengan berpatokan pada petunjuk teknis yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat dari tahun 2015 sampai pada tahun 2017 mulai meningkat dilihat dari pembangunan namun masih minim dalam peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat.

Apriliana (2017) Pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *good governance*. Penelitian ini menggunakan

metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus, yaitu mendiskripsikan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngombakan kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku (Permendagri No. 113 Tahun 2014), dan di crosscheck dengan fenomena riil yang terjadi pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngombakan dalam mewujudkan *good governance*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Ngombakan secara garis besar telah akuntabel, transparan, dan partisipatif. Namun, secara teknis masih terdapat kendala. Kendala tersebut merupakan kendala dari kabupaten yang terlambat dalam membuat Peraturan Bupati mengenai peraturan tentang ADD dan pengelolaannya.

Miftahuddin (2018) Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa (studi kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan dana desa yang diterapkan oleh pemerintah Desa Panggungharjo sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Panggungharjo menggunakan media informasi digital, terdapat informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu juga terdapat papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa. Meskipun pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dana desa masih rendah.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Feiby Vencenti Tangkumahat, Vicky V. J. Panelewen dan Arie D. P. Mirah (2017) (Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa).	Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data berasal dari pengamatan dan wawancara. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota masyarakat desa di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa di tujuh desa. Setiap desa diambil 10 (sepuluh) orang responden untuk setiap desa jadi total jumlah anggota	Hasil penelitian menunjukkan progam dana desa di Kecamatan Pineleng berjalan cukup baik, namun untuk perlu adanya peningkatan kapasitas dan skill dari aparatur pemerintah desa dalam rangka mendukung pelaksanaan program ini guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti program pemanfaatan dana desa. Perbedaan-nya, penelitian ini mengkaji dampak yang diterima masyarakat dengan adanya dana desa.

Tabel 2.1 – Lanjutan

		masyarakat yang menjadi sampel yakni 70 (tujuh puluh) orang responden.		
2	Irma Setianingsih (2017) (Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Melawi).	Penelitian ini bersifat kuantitatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPMPDKes bangpol Kabupaten Melawi yang terdiri dari 169 desa dan data <i>cross-section</i> merupakan suatu data yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang dikumpulkan pada waktu yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa untuk pembangunan desa berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap angka kemiskinan. Sedangkan dana desa untuk pembinaan kemasyarakatan desa dan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa tidak berpengaruh signifikan	Persamaan: Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana desa. Perbedaan: Variabel dependen yg digunakan adalah kemiskinan

Tabel 2.1 – Lanjutan

		sama (<i>at the same point in time</i>).	dengan arah negatif.	
3	Intan Mala Sari dan M. Faisal Abdullah (2017) (Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung).	Jenis penelitian adalah penelitian yang bersifat explanatory. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Tulungagung, yang terdiri dari 257 desa. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling.	Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015-2016 serta terjadi perbedaan kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung antara tahun 2015 dengan 2016.	Persamaan: Pada penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah dana desa. Perbedaan: Data sekunder yang digunakan diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
4	M. Indra Maulana (2018) Peran Dana Desa Dalam	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.	Hasil penelitian pengolahan dana desa yang ada di	Persamaan: Variabel independennya adalah dana

Tabel 2.1 – Lanjutan

	Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Sinar Palembang Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan).	Teknik pegumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara bebas terpimpin, observasi dan dokumentasi.	Desa Sinar Palembang kec. Candipuro, kab. Lampung selatan, berjalan dengan berpatokan pada petunjuk teknis yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat dari tahun 2015 sampai pada tahun 2017 mulai meningkat dilihat dari pembangunan namun masih minim dalam peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat.	desa. Sama-sama ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Perbedaan: Jenis penelitiannya merupakan penelitian kualitatif
5	Riska Apriliana (2017),	Penelitian ini	Hasil dari penelitian ini	Persamaan: Variabel

Tabel 2.1 – Lanjutan

	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance	menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus, yaitu mendeskripsikan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Ngombakan kemudian dibandingkan dengan peraturan yang berlaku (Permen- dagri No. 113 Tahun 2014), dan di crosscheck dengan fenomena riil yang terjadi pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa	menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di desa Ngombakan secara garis besar telah akuntabel, transparan, dan partisipatif. Namun, secara teknis masih terdapat kendala. Kendala tersebut merupakan kendala dari kabupaten yang terlambat dalam membuat Peraturan Bupati mengenai peraturan tentang ADD dan pengelolan-nya.	independen-nya adalah penge-lolaan dana desa. Perbedaan: Variabel dependen-nya Good Governance
--	---	--	--	---

Tabel 2.1 – Lanjutan

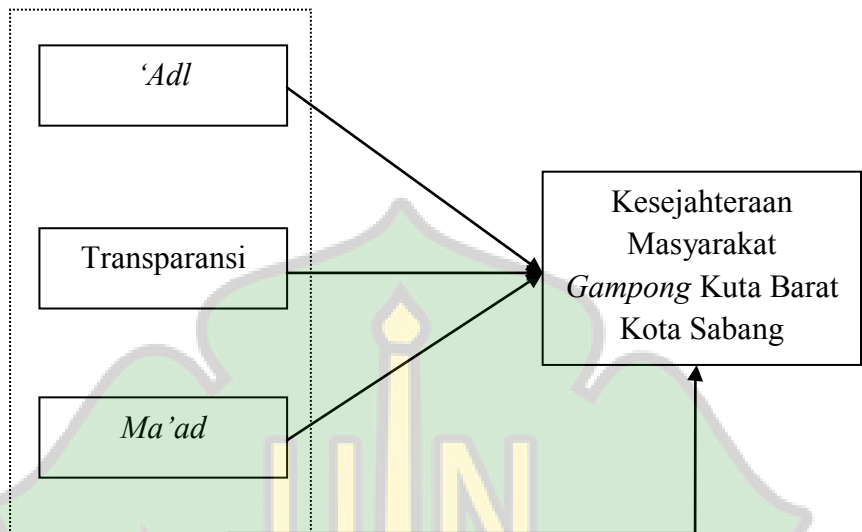
		Ngombakan dalam mewujudkan good governance.		
6	Miftahuddin (2018), Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dengan teknik semi-terstruktur. Wawancara dilakukan dengan pihak pemerintah desa dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan dari	Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa Panggungharjo mengguna-	Persamaan: Sama-sama meneliti pengelolaan Dana Desa. Perbedaan: Jenis penelitiannya menggunakan metode kualitatif

Tabel 2.1 – Lanjutan

		masyarakat, yang berjumlah 9 orang informan.	kan media informasi digital, terdapat informasi yang disebar tiap-tiap dusun. Selain itu juga terdapat papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa. Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.	
--	--	---	---	--

Sumber: Data Diolah (2019)

2.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.9 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang ada maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

- H1 : *'Adl* berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang
- H2 : Transparansi berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang
- H3 : *Ma'ad* berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang

H4 : *'Adl*, transparansi dan *ma'ad* berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat *Gampong Kuta Barat Kota Sabang*.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di *Gampong* Kuta Barat, Kecamatan Suka Karya, Kota Sabang. *Gampong* ini memiliki luas wilayah $\pm 88,86$ Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 4029 jiwa. Secara administrasi batas-batas *Gampong* Kuta Barat adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan *Gampong* Kuta Ateuh
2. Sebelah selatan berbatasan dengan teluk Sabang
3. Sebelah timur berbatasan dengan *Gampong* Kuta Timu
4. Sebelah barat berbatasan dengan teluk Sabang

Pemilihan *Gampong* Kuta Barat sebagai lokasi penelitian tentang prinsip pengelolaan dana desa dalam perspektif Islam dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat dikarenakan berdasarkan hasil observasi awal, terlihat bahwa *Gampong* Kuta Barat memiliki tingkat jumlah fakir miskin tertinggi untuk Kecamatan Suka karya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kemiskinan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti dan mengetahui lebih lanjut mengenai prinsip pengelolaan dana desa dalam perspektif Islam dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014:13). Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan *software* seperti *microsoft excel* dan SPSS versi 26 untuk menganalisis data yang diperoleh di lapangan.

3.3 Tahapan Penelitian

Adapun tahapan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat *Gampong* Kuta Barat sebagai responden.
2. Mungumpulkan data hasil penyebaran kuesioner yang disebarkan kepada responden.
3. Melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan bantuan *software* SPSS versi 26.
4. Melakukan uji dan pengolahan data dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan *software* SPSS versi 26.

5. Menyusun hasil penelitian dimulai dari latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode analisis, tahapan pengumpulan data, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran.

3.4 Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Menurut Sunyoto (2013:21), Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Data primer juga dapat disebut data baru yang *up to date*. Data primer di penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan langsung kepada masyarakat *Gampong* Kuta Barat sebagai responden dalam penelitian ini.

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:389). Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Siyoto dan Sodik, 2015:64). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga yang berada di *Gampong* Kuta Barat yang berjumlah

4.029 jiwa. Teknik sampling adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *probability sampling*. Menurut Sugiyono (2014:118), *Probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Jenis *probability sampling* yang digunakan mengambil sampel pada penelitian ini adalah *simple random sampling*. *Simple random sampling* adalah penentuan sampel dilakukan secara random/acak dengan tidak memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Adapun menurut Champion dalam Indrawan dan Poppy (2014:102), bahwa uji-uji statistik yang ada akan sangat efektif jika diterapkan pada sampel yang jumlahnya 30 sampai dengan 60 atau dari 120 sampai dengan 250. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan 46 sampel. Dalam penelitian ini, kuesioner akan dibagikan kepada masyarakat umum, meliputi aparat *gampong* dan masyarakat biasa.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara khusus yang digunakan peneliti dalam menggali data dan fakta yang diperlukan dalam penelitian (Hamdi dan Bahrudin, 2014:49). Karena jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, maka peneliti memilih kuesioner/angket sebagai sarana dalam mengumpulkan datanya. Kuesioner adalah instrumen pengumpulan data untuk memperoleh

informasi dari responden yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan tertulis kepada responden. Peneliti memilih kuesioner karena dianggap cocok untuk jumlah responden yang besar.

Kuisisioner dapat berupa pertanyaan/ Pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau melalui internet (Sugiyono, 2014:193). Dalam hal ini, kuisisioner yang digunakan dalam menghimpun data primer lebih dahulu diuji kesesuaian dengan kecepatan dan kecermatan pertanyaan atau pernyataan. Tujuannya adalah agar mampu dipahami oleh responden guna mendapatkan data yang sesuai dengan yang diharapkan.

Setelah melalui proses kesesuaian pada pertanyaan atau pernyataan, proses selanjutnya adalah melakukan uji coba kuisisioner kepada 46 masyarakat *Gampong* Kuta Barat yang menjadi responden penelitian ini. Hasil dari uji coba kuisisioner tersebut kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan *software*.

3.7 Variabel Penelitian dan Definisi Operasionalisasi Variabel

3.7.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:61). Variabel

yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas atau variabel independen (X) dan variabel terikat atau dependen (Y).

Variabel bebas atau variabel independen. Menurut Sugiyono (2014:61) variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Adapun variabel penelitian ini terdiri atas tiga variabel independen (bebas) yaitu: *'adl*, transparansi dan *ma'ad*.

- a. *'Adl*, bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata sama rasa (Idri, 2015: 29)
- b. Transparansi adalah prinsip keterbukaan dimana semua kegiatan pemerintahan dikelola secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa yang jujur dan benar (Astuti dan Yulianto, 2016:5)
- c. *Ma'ad*, merupakan implikasi nilai dalam perekonomian dan bisnis bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan hasil di dunia (laba/profit) dan hasil di akhirat (pahala) (Karim, 2003: 68)

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014:61). Dan untuk variabel dependen (terikat) penelitian ini yaitu kesejahteraan masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang (Y).

3.7.2 Definisi Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Di samping itu, operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat. Secara lebih rinci operasionalisasi variabel dalam penelitiannya ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Definisi dan Operasionalisasi Penelitian

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1	<i>‘Adl</i> (X1)	<i>‘Adl</i> , bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata sama rasa (Idri, 2015: 29)	1. pemenuhan kebutuhan : distribusi dana desa lebih ditunjukkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. 2. kesesuaian distribusi : Dana desa didistribusikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. menempatkan sesuatu sesuai posisi dan porsinya : pengelolaan dana desa ditempatkan sesuai posisi dan porsinya. 4. tidak berbuat zalim kepada sesama : dalam pengelolaan dana desa tidak mendzalimi salah satu pihak. 5. Partisipasi: masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam	Likert

Tabel 3.1 - Lanjutan

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
			penyusunan program ADG.	
2	Transpa-ransi (X2)	Transparansi adalah prinsip keterbukaan dimana semua kegiatan pemerintahan dikelola secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa yang jujur dan benar. (Astuti dan Yulianto, 2016)	1. pengelolaan: pemerintah terbuka dalam pengelolaan keuangan desa. 2. pertanggungjawaban: pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan secara legal setiap dana desa yang dikelola. 3. kelembagaan: dalam pengelolaannya pemerintah desa melibatkan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. 4. kepercayaan: masyarakat percaya sepenuhnya kepada pemerintah desa dalam mengelola dana desa. 5. kemudahan: masyarakat mudah untuk mendapatkan akses mengenai pengelolaan keuangan <i>gampong</i>.	<i>Likert</i>
3	<i>Ma'ad</i> (X3)	<i>Ma'ad</i> , merupakan implikasi nilai dalam perekonomian dan bisnis bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan hasil di dunia (laba/profit) dan	1. sejahtera: hasil dari pengelolaan dana desa dapat mensejahterakan masyarakat desa. 2. kepuasan: hasil dari pengelolaan dana desa dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat desa. 3. dapat dirasakan : hasil dari pengelolaan dana desa dapat dirasakan oleh masyarakat desa.	<i>Likert</i>

Tabel 3.1 - Lanjutan

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
		hasil di akhirat (pahala) (Karim, 2003: 68)	4. dapat dimanfaatkan: hasil dari pengelolaan dana desa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa. 5. fasilitas: fasilitas umum yang digunakan masyarakat saat ini adalah hasil dari pengelolaan dana desa.	
5	Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah (Sodiq: 2015)	1. Kependudukan 2. Kesehatan 3. Pendidikan 4. perumahan dan lingkungan 5. sosial budaya	<i>Likert</i>

Sumber: Data Diolah (2019)

3.8 Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur nilai variabel adalah dengan menggunakan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian (Sugiyono, 2014:136).

Selanjutnya, Sugiyono (2014:132) menjelaskan bahwa jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala *likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain:

Tabel 3.2
Item Instrumen yang Menggunakan Skala *Likert*

a. Sangat Setuju	a. Sangat Baik
b. Setuju	b. Baik
c. Netral	c. Netral
d. Tidak Setuju	d. Tidak Baik
e. Sangat Tidak Setuju	e. Sangat Tidak Baik

Urutan skala pengukuran ini dimulai dari (sangat tidak setuju) – (sangat setuju) untuk semua variabel. Di mana, kriteria yang digunakan yakni:

Tabel 3.3
Skala Pengukuran Responden (Skala *Likert* 1-5)

No	Jawaban	Kode
1	Sangat Tidak Setuju	STS
2	Tidak Setuju	TS
3	Netral	N
4	Setuju	S
5	Sangat Setuju	SS

Sumber: Sugiyono (2014:132)

Skala 1 sampai 5 untuk memudahkan responden dalam menjawab pernyataan yang diajukan. Setiap pertanyaan/ Pernyataan akan dijawab oleh responden berdasarkan skala *likert* tersebut. Berdasarkan hipotesis, indikator pertanyaan mencakup tentang 'adl,transparansi dan ma'ad serta variabel Y yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang.

3.9 Uji Instrumen Penelitian

Keabsahan data dalam penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji validitas (kesahihan) dan reliabilitas (keandalan) untuk memastikan kuisioner/angket tersebut valid dan dapat diandalkan untuk penelitian selanjutnya.

3.9.1 Validitas

Menurut Singarimbun (1995:124) validitas merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur sejauh mana alat ukur dapat mengukur apa yang ingin diukur. Validitas ini pada dasarnya digunakan untuk melihat kesamaan antara yang terkumpul dengan data yang sebenarnya terjadi dalam objek penelitian, sehingga data yang diperoleh benar-benar valid.

Menurut Ghazali (2012:45) uji validitas dapat dihitung dengan melakukan perbandingan antara nilai r hitung dengan nilai r tabel. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel dan memiliki nilai positif, maka pertanyaan yang di uji dikatakan valid. Kriteria penilaian uji validitas yang digunakan tersebut yaitu:

- a. Jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka komponen kuesioner dinyatakan valid.
- b. Jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka komponen kuesioner dinyatakan tidak valid.

3.9.2 Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan instrumen yang digunakan dalam penelitian guna untuk mengetahui sejauh mana hasil dari suatu pengukuran dapat relatif konsisten meskipun pengukuran tersebut dilakukan berulang kali (Singarimbun, 1995:140). Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kuesioner yang digunakan dapat memperlihatkan kestabilan dari hasil penelitian berikutnya dengan kondisi yang tetap. Dalam mengukur reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α) (Ghozali, 2012: 47). Kriteria penilaian uji reliabilitas yang digunakan tersebut yaitu:

- a. Jika hasil koefisien *alpha* lebih besar dari 0,60 maka kuesioner tersebut dinyatakan reliabel.
- b. Jika hasil koefisien *alpha* lebih kecil dari 0,60 maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak reliabel.

3.10 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan tahap yang penting dalam analisis regresi. Uji asumsi klasik berguna untuk melengkapi uji statistik yang telah dilakukan yaitu uji t dan uji f . Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas dan multikolieritas.

3.10.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $>0,05$ (Ghozali, 2012: 160-165). Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji grafik histogram, P-P Plot dan uji *Kolmogorov-Smirnov* (Janie, 2012:23).

a. Uji Grafik Histogram

Grafik histogram membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Adanya uji ini dapat diketahui apakah data berdistribusi secara normal atau tidak berdasarkan kemiringan grafik, baik ke kanan maupun ke kiri. Selain itu, grafik histogram dapat digunakan untuk menentukan bentuk transformasi data yang akan digunakan untuk menormalkan data yang tidak berdistribusi secara normal.

b. Uji P-P Plot

Uji P-P Plot digunakan untuk melihat apakah variabel dependen dan independen mengikuti sebaran normal atau tidak. Apabila residu menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti

arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

c. Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S)

Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan pengujian normalitas dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Apabila nilai signifikan di bawah 0,05 menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya perbedaan yang signifikan dan jika nilai signifikan di bawah 0,05 maka terdapat adanya perbedaan yang signifikan atau hasil tidak normal (Janie, 2012: 24).

3.10.2 Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian pada penelitian ini menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Kemungkinan tidak terjadinya heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y (Ghozali, 2012: 139-143).

3.10.3 Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2012: 105-106), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji

multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10 atau besar toleransi $> 0,1$ (10%), maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

3.11 Metode Analisis Data

Sebelum memulai metode analisis data pada penelitian ini peneliti menggunakan program Statistik SPSS Versi 26 untuk memudahkan proses pengolahan dan analisis data. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda data primer.

Analisis regresi ingin mempelajari bagaimana eratnya hubungan antara satu atau beberapa variabel independen dengan sebuah variabel dependen. Jika parameter dari suatu hubungan fungsional antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel ingin diestimasi, maka analisis regresi yang dikerjakan berkenaan dengan regresi berganda (*multiple regression*).

Menurut Sunyoto (2013) analisis regresi linier berganda adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat Analisis regresi berganda mempunyai kaedah yang sama seperti analisis regresi sederhana. Jadi analisis ini bertujuan untuk mengukur pengaruh dari 'adl,transparansi dan ma'ad terhadap variabel terikat yaitu kesejahteraan masyarakat di Gampong Kuta Barat Kota Sabang".

Rumus-rumus yang digunakan pun tidak lain dari pengembangan dari rumus rumus yang digunakan pada regresi linier sederhana.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad (3.1)$$

Keterangan:

α = Konstanta

β_1, β_2 , dan β_3 = Koefisien regresi

X_1 = 'Adl

X_2 = Transparansi

X_3 = Ma'ad

e = Error

3.12 Pembuktian Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan dua pengujian. Adapun yang pertama adalah uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel independen (bebas) secara parsial terhadap variabel dependen. Dan selanjutnya, yang kedua adalah uji F yang digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel independen (bebas) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat). Adapun model pengujian tersebut adalah:

3.12.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji T yaitu uji yang dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi-variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan penelitian ini menggunakan uji T dilakukan dengan bantuan SPSS dengan taraf signifikan 0,05. Jika T hitung lebih besar dari T tabel dengan

nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dikatakan signifikan (Ghozali, 2011). Dengan demikian, jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ sig. $< 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sebaliknya, $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau sig. $> 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

H_{01} : '*Adl* tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang.

H_1 : '*Adl* mempengaruhi kesejahteraan masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang.

H_{02} : Transparansi tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang.

H_2 : Transparansi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang.

H_{03} : *Ma'ad* tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang.

H_3 : *Ma'ad* mempengaruhi kesejahteraan masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang.

H_{04} : '*Adl*, transparansi dan *ma'ad* tidak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang.

H_4 : '*Adl*, transparansi dan *ma'ad* mempengaruhi kesejahteraan masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang.

3.12.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah pengaruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan Uji F adalah:

1. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ sig. $< 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, ini menyatakan bahwa semua variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau sig. $> 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, ini menyatakan bahwa semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2012:99).

Uji tabel F digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dengan dependen secara simultan (bersama-sama) sehingga dapat dirumuskan hipotesis untuk yang kedua dalam uraian kalimat, sebagai berikut:

H_0 = 'Adl,transparansi dan *ma'ad* tidak berpengaruh secara simultan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang.

H_4 = 'Adl,transparansi dan *ma'ad* berpengaruh secara simultan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang.

Dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) 5%. H_0 diterima jika Sig. F $> 0,05$ artinya tidak ada pengaruh yang simultan antara '*adl*,transparansi dan *ma'ad* yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang. Sebaliknya H_F diterima jika Sig. F $< 0,05$ artinya ada pengaruh yang simultan antara '*adl*, transparansi dan *ma'ad* yang

mempengaruhi kesejahteraan masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang.

3.12.3 Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Uji R^2 ini menunjukkan sejauh mana tingkat hubungan antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y). Menurut Ghazali (2012:97) koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya jika nilainya mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah *Gampong* Kuta Barat Kecamatan Suka karya Kota Sabang. *Gampong* Kuta Barat merupakan desa yang berada di Kecamatan Suka karya Kota Sabang. Secara geografis *Gampong* Kuta Barat terletak 095.31803° E " BT dan terletak di "05.88998° N" LU. Secara topografi *Gampong* Kuta Barat termasuk dalam kategori daerah dataran rendah dengan ketinggian ± 0 . M dari permukaan laut (mdpl). Menurut tokoh-tokoh masyarakat yang masih hidup dan bertempat tinggal di *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang, *Gampong* ini terbentuk secara resmi pada tahun 1945. Sebelum kemerdekaan Indonesia secara umum *Gampong* Kuta Barat yang menjadi bagian dari Kota Sabang yang merupakan daerah jajahan Belanda dan berdasarkan sejarah, Kota Sabang saat itu menjadi daerah Perdagangan, Pelabuhan Bebas dan Wisata yang sangat maju pada zaman itu. Dalam hal ini *Gampong* Kuta Barat yang menjadi bagian dari Kota Sabang merupakan daerah Pelabuhan dan Pusat Perdagangan.

Luas wilayah *Gampong* Kuta Barat adalah ± 4 Km² yang terdiri dari : pemukiman, pertokoan, tempat ibadah, sarana umum, dan lain-lain. Adapun batas-batas wilayah *Gampong* Kuta Barat Kecamatan Suka Karya Kota Sabang adalah sebagai berikut,

- a. Sebelah Utara : *Gampong* Kuta Ateuh
- b. Sebelah Timur : *Gampong* Kuta Timur
- c. Sebelah Selatan : Teluk Sabang
- d. Sebelah Barat : *Gampong* Kuta Ateuh

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah *Gampong* Kuta Barat terbagi ke dalam wilayah *Jurong*, *Aneuk Jurong*. dan Ketua Pemuda Adapun jumlah *Jurong*, *Aneuk Jurong* dan Ketua Pemuda dalam *Gampong* Kuta Barat sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah *Jurong*, *Aneuk Jurong* dan Ketua Pemuda *Gampong* Kuta Barat

No	<i>Jurong</i>	<i>Aneuk Jurong</i>	Ketua Pemuda
1	Babul Iman	3	1
2	Lhok Panglima	3	1
3	Kebun Merica	3	1
4	Perdagangan	3	1
Jumlah		12	4

Sumber: RPJM GP. Kuta Barat, 2018-2024

4.1.1 Kondisi Ekonomi

Perekonomian *Gampong* Kuta Barat sangat dipengaruhi oleh produksi bidang pelabuhan, jasa, perikanan dan perdagangan. Hal ini merupakan salah satu potensi unggulan *Gampong*, dikarenakan sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah nelayan/perikanan dan pedagang. Berdasarkan potensi tersebut ternyata belum sepenuhnya meningkatkan pendapatan dan kebutuhan hidup masyarakat. Kecilnya pendapatan dibandingkan harga-harga komoditi yang tinggi dipasaran, karena sebagian besar barang-barang kebutuhan sehari-hari masih di impor dari luar kota.

Maka dengan adanya potensi tersebut, dipandang perlu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengadakan pelatihan, bimbingan dan pembinaan maupun pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat *Gampong* Kuta Barat Sabang.

4.1.2 Kondisi Demografi *Gampong* Kuta Barat

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di *Gampong* Kuta Barat berdasarkan hasil pendataan penduduk pada tahun 2018 adalah sebanyak 1285 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk sebanyak 4029 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 2065 dan perempuan sebanyak 1964, dimana jumlah penduduk laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk *Gampong* Kuta Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	2065 Orang
Perempuan	1964 Orang
Jumlah Penduduk	4029 Orang

Sumber: RPJM GP. Kuta Barat, 2018-2024

b. Profesi dan Pekerjaan

Berdasarkan profesi dan pekerjaan, sebagian besar penduduk *Gampong* Kuta Barat bekerja sebagai pedagang, PNS, buruh dan nelayan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Profesi dan Pekerjaan Kepala Rumah Tangga *Gampong*
Kuta Barat

Profesi dan Pekerjaan	Jumlah
Pedagang	147 Orang
Pengrajin	2 Orang
PNS	117 Orang
TNI/POLRI	22 Orang
Penjahit	15 Orang
Montir	7 Orang
Sopir	11 Orang
Karyawan Swasta	19 Orang
Kontraktor	2 Orang
Tukang Kayu	14 Orang
Tukang Batu	19 Orang
Guru	18 Orang
Buruh	54 Orang
Nelayan	25 Orang
Lainnya	60 Orang
Jumlah Total	532 Orang

Sumber: RPJM GP. Kuta Barat, 2018-2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya jenis pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh masyarakat *Gampong* Kuta Barat adalah pedagang yang berjumlah 147 orang dari total 532 orang. Dan untuk pekerjaan yang paling sedikit digeluti oleh masyarakat *Gampong* Kuta Barat adalah pengrajin dan kontraktor yang masing-masing berjumlah 2 orang. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas pekerjaan masyarakat *Gampong* Kuta Barat adalah pedagang. Hal ini dikarenakan *Gampong* Kuta Barat merupakan pusat perdagangan yang telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka.

4.2 Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong*

Dalam *Qanun Gampong* Kuta Barat nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan *Gampong* yang dibahas dan disetujui bersama oleh *Keuchik* dan *Tuha Peut*, yang ditetapkan dengan *Qanun Gampong*.

Tabel 4.4
APBG *Gampong* Kuta Barat Tahun 2019

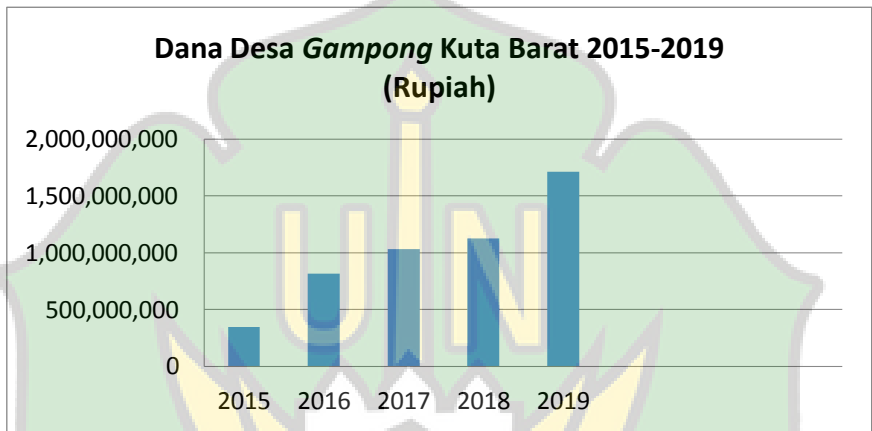
No	Alokasi Dana	Nilai
1	Pendapatan	Rp. 4,020,465,931
2	Belanja	Rp. 4,576,442,358
3	Surplus/Defisit	Rp. 555,976,427

Sumber: APBG *Gampong* Kuta Barat Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.2, Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* (APBG) 2019 diatas disebutkan bahwa pendapatan *Gampong* berjumlah Rp. 4.020.465.931 yang didapatkan dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana *Gampong*, dan Bantuan Keuangan Kab/Kota. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* (APBG) 2019 disebutkan belanja *Gampong* berjumlah Rp. 4.576.442.358. Dalam tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* (APBG) 2019 defisit sebesar Rp. 555.976.427.

4.2.1 Peningkatan Dana Desa *Gampong* Kuta Barat Tahun 2015-2019

Dana Desa yang disalurkan ke *Gampong* Kuta Barat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat diamati pada gambar 4.1 berikut:



Sumber: Kantor *Keucik Gampong* Kuta Barat

Gambar 4.1
Peningkatan Dana Desa *Gampong* Kuta Barat
Tahun 2015-2019

Pada awal peluncuran program dana desa yaitu tahun 2015, jumlah dana desa yang dialokasikan untuk *Gampong* Kuta Barat sebesar Rp.347.220.000. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Jumlah dana desa yang disalurkan untuk *Gampong* Kuta Barat berjumlah Rp.815.715.078. Begitu pula tahun berikutnya, di tahun 2017 dana desa untuk *Gampong* Kuta Barat berjumlah Rp.1.034.025.000. Tahun 2018 dana desa untuk *Gampong* Kuta Barat berjumlah Rp.1.126.562.873. Dan pada tahun 2019 dana desa

yang diberikan untuk *Gampong* Kuta Barat mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sejumlah Rp.1.711.525.000.

4.3 Karakteristik Responden

Responden pada penelitian ini merupakan sampel dari 46 masyarakat *Gampong* Kuta Barat. Karakteristik responden diklasifikasikan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, jabatan, pengalaman menjadi perangkat gampong. Adapun karakteristik responden akan dibahas secara rinci sebagai berikut:

A. Usia

Dalam pengolahan data primer hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengelompokkan responden berdasarkan usia dengan menempatkannya sesuai dengan rentang usia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2 di bawah:



Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

Gambar 4.2
Grafik Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa dari 46 responden yang diminta untuk mengisi kuesioner didominasi masyarakat yang berusia 20-30 tahun berjumlah 18 orang (39%). Lalu diikuti oleh masyarakat yang berusia >50 tahun yang berjumlah 10 orang (21%). Selanjutnya, masyarakat yang berusia 31-40 tahun dan 41-50 tahun yang berjumlah masing-masing 9 orang (20%).

B. Jenis Kelamin

Dalam pengolahan data primer hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengelompokkan responden berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

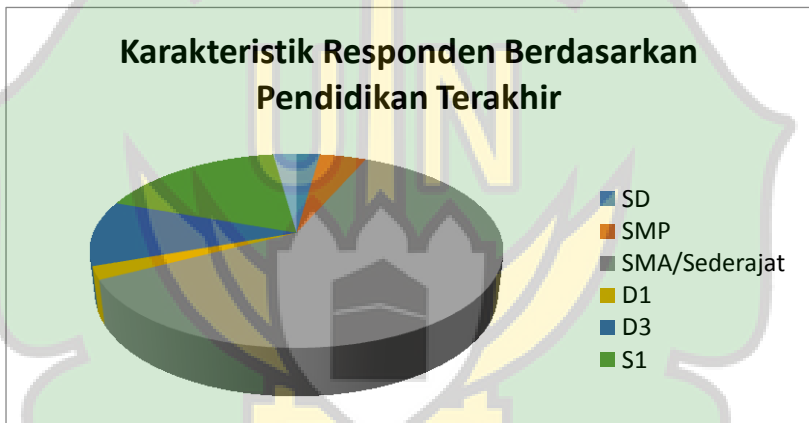
Gambar 4.3
Grafik Persentase Karakteristik Responden
Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa dari 46 responden yang diminta untuk mengisi kuesioner pada penelitian

ini di dominasi oleh laki-laki yang berjumlah 29 orang (63%). Sedangkan perempuan berjumlah 17 orang (37%).

C. Pendidikan Terakhir

Dalam pengolahan data primer hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengelompokkan responden berdasarkan pendidikan terakhir yaitu: SD, SMP, SMA/Sederajat, D1, D3, S1 dan S2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

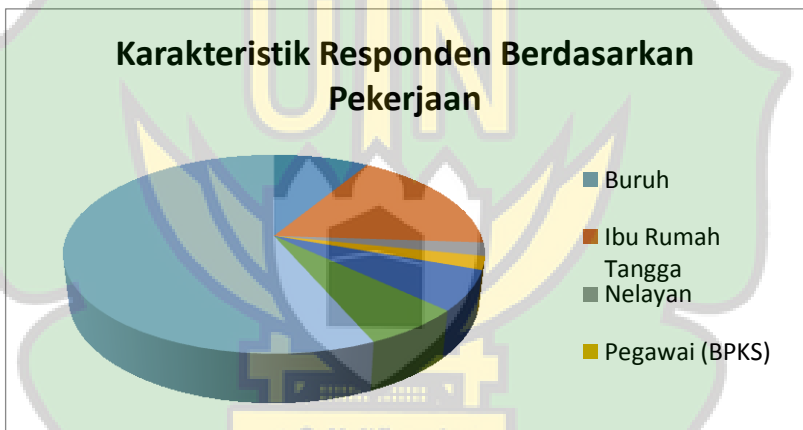
Gambar 4.4
Grafik Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa dari 46 responden yang diminta untuk mengisi kuesioner, 28 orang (61%) diantaranya menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) /Sederajat, 8 orang (18%) menempuh pendidikan Sarjana (S1), 5 orang (11%) menempuh pendidikan Diploma Tiga (D3), 2 orang (4%) menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1

orang (2%) menempuh pendidikan Magister (S2), 1 orang (2%) menempuh pendidikan Diploma Satu (D1) dan 1 orang (2%) menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD).

D. Pekerjaan

Dalam pengolahan data primer hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengelompokkan responden berdasarkan pekerjaannya yaitu: Buruh, Ibu Rumah Tangga, Nelayan, Pegawai BPKS, Pensiunan, PNS dan Wiraswasta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

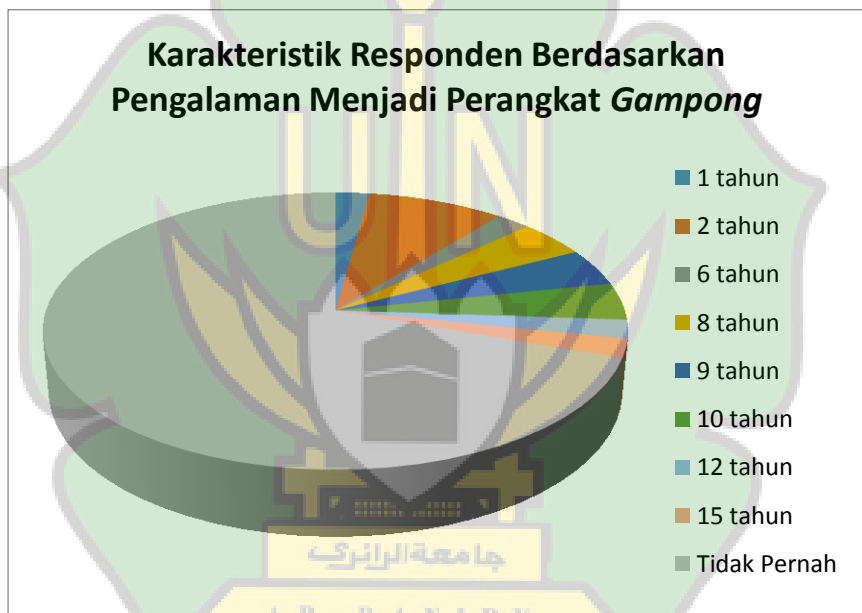
Gambar 4.5
Grafik Persentase Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa dari 46 responden yang diminta untuk mengisi kuesioner, 26 orang (57%) diantaranya merupakan wiraswasta, 8 orang (17%) merupakan ibu rumah tangga, 4 orang (9%) bekerja sebagai buruh, 3 orang (7%) bekerja sebagai PNS, 3 orang (7%) merupakan pensiunan, serta

pegawai BPKS dan nelayan masing-masing berjumlah 1 orang (2%).

E. Pengalaman Menjadi Perangkat *Gampong*

Dalam pengolahan data primer hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengelompokkan responden berdasarkan pengalaman atau lamanya menjadi perangkat *gampong*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

Gambar 4.6
Grafik Persentase Karakteristik Responden
Berdasarkan Pengalaman Menjadi Perangkat *Gampong*

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa dari 46 responden yang dimintai untuk mengisi kuesioner, 32 orang (70%) diantaranya tidak pernah menjadi perangkat *gampong*, 4 orang

(9%) pernah menjadi perangkat *gampong* 2 tahun, 2 orang (4%) pernah menjadi perangkat *gampong* 10 tahun, 2 orang (4%) pernah menjadi perangkat *gampong* 9 tahun , 2 orang (4%) pernah menjadi perangkat *gampong* 8 tahun, 1 orang (2%) pernah menjadi perangkat *gampong* 15 tahun, 1 orang (2%) pernah menjadi perangkat *gampong* 12 tahun, 1 orang (2%) pernah menjadi perangkat *gampong* 6 tahun dan 1 orang (2%) pernah menjadi perangkat *gampong* 1 tahun.

4.4 Deskriptif Statistik

Deskripsi mengenai variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel ‘*adl*, transparansi, dan *ma’ad* (variabel independen), serta kesejahteraan masyarakat (variabel dependen). Penjelasan mengenai karakteristik jawaban dari 46 responden dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.5
Karakteristik Jawaban Responden

Variabel	Indikator	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
'Adl	A1				33	13
	A3			2	33	11
	A4	1		11	29	5
	A5		16	9	16	5
Transparansi	T1			1	28	17
	T4	1	3	16	17	9
	T5		1	4	33	8
Ma'ad	M1				22	24
	M2				31	15
	M3			2	24	20

Tabel 4.5 – Lanjutan

	M5		1	4	33	8
Kesejahteraan Masyarakat	K1			1	26	19
	K2		1	4	33	8
	K3	1	19	6	15	5
	K4	1		3	29	13
	K5			1	34	11

Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

Tabel 4.4 diatas menjelaskan bahwa variabel *'adl*, responden cenderung menempatkan jawaban pada posisi setuju. Pada indikator A1, terdapat 33 orang responden yang menjawab setuju. Pada indikator A3, terdapat 33 orang responden menjawab setuju. Pada indikator A4, terdapat 29 orang responden menjawab setuju. Selanjutnya, pada indikator A5, terdapat 16 orang menjawab setuju.

Pada variabel transparansi, dalam indikator T1, terdapat 28 orang responden menjawab setuju. Pada indikator T4, terdapat 17 orang responden menjawab setuju. Dan pada indikator T5, terdapat 33 orang responden menjawab setuju.

Pada variabel *ma'ad*, dalam indikator M1 terdapat 24 orang responden menjawab sangat setuju. Pada indikator M2 terdapat 31 orang responden menjawab setuju. Pada indikator M3 terdapat 24 orang responden menjawab setuju. Dan pada indikator M5 terdapat 33 orang responden menjawab setuju.

Selanjutnya pada variabel kesesejahteraan masyarakat dalam indicator K1 terdapat 26 orang responden menjawab setuju. Pada indikator K2 terdapat 33 orang responden menjawab setuju. Pada indikator K3 terdapat 19 orang responden menjawab tidak setuju. Pada indikator K4 terdapat 29 responden menjawab setuju.

Dan pada indikator K5 terdapat 34 orang menjawab setuju. Dari penjabaran diatas dapat diketahui bahwa para responden dalam menjawab pernyataan indikator variabel cenderung menempatkan jawabannya dalam posisi setuju.

4.5 Uji Instrumen Penelitian

4.5.1 Uji Validitas

Validitas ini pada dasarnya digunakan untuk melihat kesamaan antara yang terkumpul dengan data yang sebenarnya terjadi dalam objek penelitian, sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. uji validitas dapat dihitung dengan melakukan perbandingan antara nilai r hitung dengan nilai r tabel. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel dan memiliki nilai positif, maka pertanyaan yang di uji dikatakan valid. Kriteria penilaian uji validitas yang digunakan tersebut yaitu:

- a. Jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka komponen kuesioner dinyatakan valid.
- b. Jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka komponen kuesioner dinyatakan tidak valid.

Tabel 4.6
Uji Validitas

Variabel	Indikator	Item Korelasi	Cut of value	keterangan
'Adl	A1	0,510	0,3	Valid
	A3	0,532	0,3	Valid
	A4	0,494	0,3	Valid
	A5	0,384	0,3	Valid
Transparansi	T1	0,524	0,3	Valid
	T4	0,433	0,3	Valid

Tabel 4.6 - Lanjutan

	T5	0,474	0,3	Valid
<i>Ma'ad</i>	M1	0,641	0,3	Valid
	M2	0,634	0,3	Valid
	M3	0,435	0,3	Valid
	M5	0,516	0,3	Valid
Kesejahteraan Masyarakat	K1	0,536	0,3	Valid
	K2	0,467	0,3	Valid
	K3	0,362	0,3	Valid
	K4	0,622	0,3	Valid
	K5	0,513	0,3	Valid

Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masing-masing indikator memiliki r hitung positif dan lebih besar dibandingkan r tabel sebesar 0,2907. Maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator dari ketiga variabel X_1, X_2, X_3 dan Y adalah valid.

4.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kuesioner yang digunakan dapat memperlihatkan kestabilan dari hasil penelitian berikutnya dengan kondisi yang tetap. Dalam mengukur reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Kriteria penilaian uji reliabilitas yang digunakan tersebut yaitu:

- c. Jika hasil koefisien *alpha* lebih besar dari 0,60 maka kuesioner tersebut dinyatakan reliabel.
- d. Jika hasil koefisien *alpha* lebih kecil dari 0,60 maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak reliabel.

Tabel 4.7
Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	<i>Alpha</i>	Keterangan
'Adl	0.668	0.6	Reliabel
Transparansi	0.625	0.6	Reliabel
Ma'ad	0.776	0.6	Reliabel
Kesejahteraan Masyarakat	0.714	0.6	Reliabel

Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Dengan demikian, keseluruhan variabel dapat dikatakan sudah reliabel

4.6 Uji Asumsi Klasik

4.6.1 Uji Normalitas

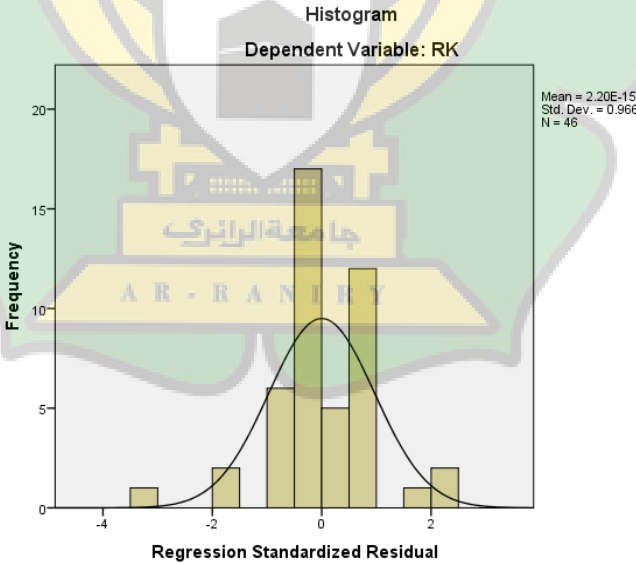
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S), uji grafik histogram dan P-P Plot. Untuk menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak dilakukan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov Test*. Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi >0,05.

Tabel 4.8
Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	46
Test Statistic	.120
Asymp. Sig. (2-tailed)	.094 ^c

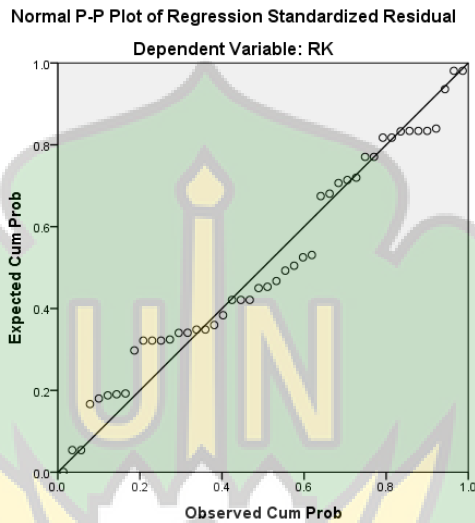
Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

Hasil pengujian pertama melalui nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,094, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.



Gambar 4.7
Grafik Histogram

Pengujian kedua melalui grafik histogram pada gambar diatas menunjukkan pola yang berdistribusi normal. Artinya data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal.

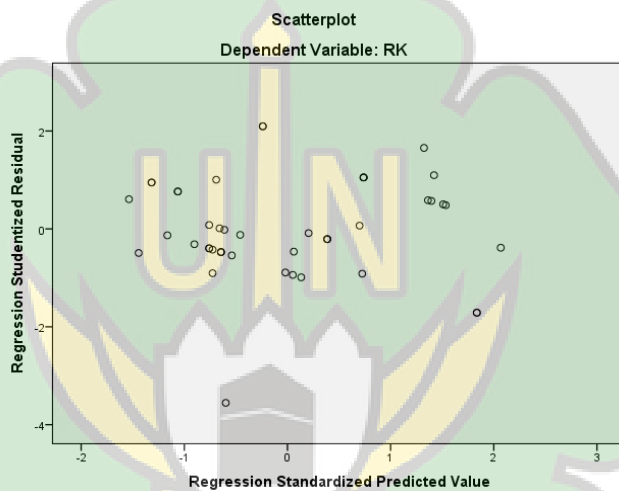


Gambar 4.8
Grafik Normal P-Plot

Begitu juga dengan pengujian ketiga melalui grafik normal p-plot pada gambar diatas memperlihatkan sebaran data mengikuti garis diagonalnya. Dari hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

4.6.2 Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian pada penelitian ini menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.



Gambar 4.9
Grafik Scatterplot

Kemungkinan tidak terjadinya heteroskedastisitas apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y.

Berdasarkan *output* scatterplot diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.6.3 Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10 atau besar toleransi > 0,1 (10%), maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

Tabel 4.9
Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	<i>'Adl</i>	.760	1.316
	Transparansi	.669	1.495
	<i>Ma'ad</i>	.634	1.578

Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel bebas <10. Hal ini sesuai dengan ketentuan uji multikolinieritas, jika nilai VIF <10 maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam penelitian ini, sehingga nilai prediksi variabel terikat yang diperoleh menjadi akurat.

4.7 Hasil Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah '*adl*', transparansi dan *ma'ad* sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah kesejahteraan masyarakat. Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis regresi yaitu uji asumsi klasik. Persamaan umum dari regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Analisis Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.829	.732		1.132	.264
' <i>Adl</i>	.207	.144	.212	1.442	.157
Transparansi	.097	.145	.104	.667	.508
<i>Ma'ad</i>	.451	.203	.357	2.221	.032

c. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 0.829 + 0.207X_1 + 0.097X_2 + 0.451X_3 + e$$

Interpretasi :

1. Variabel '*adl*' memiliki koefisien regresi terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,207.
2. Variabel transparansi memiliki koefisien regresi terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,097.

3. Variabel *ma'ad* memiliki koefisien regresi terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,451. Artinya, *ma'ad* berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika tingkat *ma'ad* naik satu satuan maka kesejahteraan masyarakat naik sekitar 0,451 satuan.

4.8 Pembuktian Hipotesis

4.8.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji T yaitu uji yang dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Jika T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} dengan nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dikatakan signifikan. Dengan demikian, jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ sig. < 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sebaliknya, $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau sig. > 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 4.11
Uji Parsial (T)

Model	Unstandardized		Standardized	t	Sig.
	Coefficients		Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.829	.732		1.132	.264
Adl	.207	.144	.212	1.442	.157
Transparansi	.097	.145	.104	.667	.508
Ma'ad	.451	.203	.357	2.221	.032

Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas nilai T_{hitung} 'adl adalah sebesar 1.442 lebih kecil dari T_{tabel} sebesar 1.680 maka, H_{01} diterima dan H_1 ditolak. Dengan demikian, variabel 'adl tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai sig sebesar 0,157 lebih besar dari nilai α 0,05.

Nilai T_{hitung} transparansi adalah sebesar 0,667 lebih kecil dari T_{tabel} sebesar 1,680 maka, H_{02} diterima dan H_2 ditolak. Dengan demikian, variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai sig sebesar 0,508 lebih besar dari nilai α 0,05.

Nilai T_{hitung} *ma'ad* adalah sebesar 2,221 lebih besar dari t tabel sebesar 1,680 maka, H_{03} ditolak dan H_3 diterima. Dengan demikian, variabel *ma'ad* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai sig sebesar 0,032 lebih kecil dari nilai α 0,05.

4.8.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah pengaruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan Uji F adalah:

1. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ sig. < 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak, ini menyatakan bahwa semua variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $sig. > 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, ini menyatakan bahwa semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Uji tabel F digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dengan dependen secara simultan (bersama-sama) sehingga dapat dirumuskan hipotesis untuk yang kedua dalam uraian kalimat, sebagai berikut:

H_0 = '*adl*, transparansi dan *ma'ad* tidak berpengaruh secara simultan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang.

H_4 = '*adl*, transparansi dan *ma'ad* berpengaruh secara simultan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang.

Dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) 0,05 H_0 diterima jika $sig. F > 0,05$ artinya tidak ada pengaruh yang simultan antara '*adl*, transparansi dan *ma'ad* yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang. Sebaliknya H_4 diterima jika $sig. F < 0,05$ artinya ada pengaruh yang simultan antara '*adl*, transparansi dan *ma'ad* yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang.

Tabel 4.12
Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.491	3	1.164	6.324	.001 ^b
	Residual	7.728	42	.184		
	Total	11.218	45			

Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas nilai F_{hitung} 6,324 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,83 maka H_{0F} ditolak dan H_F diterima. Dengan demikian, variabel '*adl*, transparansi dan *ma'ad* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat dari nilai sig. sebesar 0,01 lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05.

4.9 Uji R-Square (R^2)

Uji R^2 ini menunjukkan sejauh mana tingkat hubungan antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 4.13
Uji R-Square

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.558 ^a	.311	.262	.42894

a. Predictors: (Constant), RM, RA, RT

b. Dependent Variable: RK

Sumber: Pengolahan Data Primer Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas nilai R^2 dalam penelitian ini sebesar 0,311 atau 31,1%. Artinya, 31,1% variabel dependen kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan oleh variabel independen '*adl*, transparansi dan *ma'ad* dan sisanya sebesar 68,9% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

4.10 Pembahasan

Penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh '*adl*, transparansi dan *ma'ad* terhadap kesejahteraan masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang. Berikut ini adalah pembahasan dari masing-masing variabel yang terkait dalam penelitian ini:

4.10.1 Pengaruh '*Adl* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang

Berdasarkan uji statistik secara parsial pada variabel '*adl* (X1) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,442 dan T_{tabel} sebesar 1,680 sehingga T_{hitung} lebih kecil dari T_{tabel} ($1,442 < 1,680$) dan nilai sig. sebesar 0,157 lebih besar dari nilai *alpha* 0,05 maka H_{01} diterima dan H_1 ditolak. Artinya, variabel '*adl* tidak berpengaruh signifikan

secara parsial terhadap variabel kesejahteraan masyarakat. Dari keseluruhan jawaban responden, banyak yang menjawab setuju dan sangat setuju bahwa kesejahteraan masyarakat dapat meningkat apabila adanya keadilan dalam mengelola dana desa. Namun dalam pengelolaannya masyarakat masih belum merasakan nilai keadilan.

4.10.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat *Gampong Kuta Barat Kota Sabang*

Nilai T_{hitung} pada variabel transparansi terhadap keputusan adalah sebesar 0,667 yakni lebih kecil dari nilai T_{tabel} sebesar 1,680 ($0,667 < 1,680$) dengan nilai sig sebesar 0,508 lebih besar dari nilai α 0,05 ($0,508 > 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, variabel transparansi (X_2) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (Y). Dari keseluruhan jawaban responden, banyak yang menjawab setuju dan sangat setuju bahwa kesejahteraan masyarakat dapat meningkat apabila adanya transparansi. Namun, masyarakat masih menganggap Kantor *Keucik Gampong Kuta Barat* belum transparan dalam mengelola dana desa. terlepas dari itu semua, Kantor *Keucik Gampong Kuta Barat* telah transparan dalam pengelolaan dana desa.

Hal ini dapat dilihat dari adanya papan informasi yang ditempatkan di Kantor *Keucik Gampong Kuta Barat* sebagai bentuk dari transparansi dan informasi yang disebar melalui Ketua RT dan Ketua *jurong*. Didukung dengan penelitian Miftahuddin (2018),

yang menyatakan bahwa meskipun pengelolaan dana desa yang dilaksanakan pemerintahan desa sudah baik, akan tetapi pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan dana desa masih minim. Atas dasar ini juga masyarakat *Gampong* Kuta Barat menganggap Kantor *Keucik* Kuta Barat belum transparan.

4.10.3 Pengaruh *Ma'ad* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang

Nilai T_{hitung} pada variabel *ma'ad* terhadap kesejahteraan masyarakat adalah sebesar 2,221 yakni lebih besar dari nilai T_{tabel} sebesar 1,680 ($2,221 > 1,680$) dan nilai sig sebesar 0,032 lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05 ($0,032 < 0,05$). maka H_0 ditolak dan H_3 diterima. Artinya, variabel *ma'ad* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (Y). Hal ini disebabkan dari keseluruhan jawaban responden banyak menjawab setuju dan sangat setuju bahwa *ma'ad* mempengaruhi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Ma'ad* yang dimaksudkan disini adalah hasil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa hasil dari pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintahan *Gampong* Kuta Barat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat *gampong* tersebut.

4.10.4 Pengaruh 'Adl, Transparansi dan *Ma'ad* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang

Berdasarkan uji statistik secara simultan maka diperoleh nilai F_{hitung} 6,324 lebih besar dari nilai F_{tabel} 2,83 ($6,324 > 2,83$)

dengan nilai sig sebesar 0,01 lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05 ($0,01 < 0,05$). Artinya, variabel bebas '*adl*, transparansi dan *ma'ad*' secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis koefisien determinasi di dapat nilai R square sebesar 0,311 atau 31,1%.

Hal ini sesuai dengan teori yang di kemukakan dimana nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Semakin baik hasil untuk model regresi tersebut maka semakin mendekati 1 dan sebaliknya jika semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen. Jadi dapat disimpulkan dalam penelitian ini mempunyai hubungan tidak kuat antara variabel independen terhadap variabel dependen, dikarenakan nilai R^2 mendekati 0 yaitu 31,1%, artinya hanya 31,1% variabel independen ('*adl*, transparansi dan *ma'ad*') dapat mempengaruhi variabel dependen (kesejahteraan masyarakat). Sedangkan sisanya sebesar 68,9% dipengaruhi variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan perumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda melalui uji T pada variabel '*adl*' tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan nilai nilai T_{hitung} sebesar 1.442 dan t_{tabel} sebesar 1.680 sehingga T_{hitung} lebih kecil dari T_{tabel} ($1.442 < 1.680$) dan nilai sig sebesar 0.157 lebih besar dari nilai *alpha* 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum merasakan nilai keadilan dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintahan *Gampong* Kuta Barat.
2. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda melalui uji T pada variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan nilai T_{hitung} sebesar 0.667 yakni lebih kecil dari nilai T_{tabel} sebesar 1.680 ($0.667 < 1.680$) dengan nilai sig sebesar 0,508 lebih besar dari nilai *alpha* 0.05 ($0.508 > 0.05$). Artinya dalam pengelelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintahan *Gampong* Kuta Barat masih dianggap kurang transparan oleh masyarakat.

3. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda melalui uji T pada variabel *ma'ad* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan nilai T_{hitung} 2.221 yakni lebih besar dari nilai T_{tabel} sebesar 1.680 ($2.221 > 1.680$) dan nilai sig sebesar 0.032 lebih kecil dari nilai α 0.05 ($0.032 < 0.05$). Artinya, hasil dari pengelolaan dana desa berdampak baik untuk kesejahteraan masyarakat
4. Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda melalui uji F pada variabel '*adl*', transparansi dan *ma'ad* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan nilai F_{hitung} 6.324 lebih besar dari nilai F_{tabel} 2.83 ($6.324 > 2.83$) dan nilai sig sebesar 0.01 lebih kecil dari nilai α 0.05 ($0.01 < 0.05$). Hal ini menunjukkan bahwa '*adl*', transparansi dan *ma'ad* secara bersama-sama saling berhubungan dalam mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan diatas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintahan *Gampong* Kuta Barat Kota Sabang agar dapat lebih adil dalam mengelola dana desa agar dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintahan *gampong* juga diharapkan agar lebih transparan lagi dalam pengelolaan keuangan *gampong* dan

dapat memberikan edukasi kepada masyarakat *gampong* mengenai dana desa agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengelolaan keuangan *gampong*.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya.

A. Karim, A. (2003). *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IIIT. Indonesia.

Arikunto, Suharsimi. (2002). *Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Astuti dan Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 1 No.1*.

Aziz, Nyimas Latifah Letty. (2016). Otonomi Desa dan Efektifitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik Volume 13, No.2, Desember 2016*.

Badan Pusat Statistik. (2018). *Kecamatan Sukakarya dalam Angka Tahun 2018*.

Ghozali, Imam. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hamdi, S.A., & Bahrudin. E. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.

Huda, N, dkk. (2012). *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoretis Dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.

Idri. (2015). *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Kencana.

Indrawan, Rully dan Yaniawati, Poppy. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Cetakan Ke-1. Bandung: Refika Aditama.

- Indonesia Corruption Watch. (2018). *Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Janie. (2012). *Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Berganda dengan SPSS*. Semarang: Semarang University Press.
- Khoir, Misbahul. (2015). Prinsip Dasar Ekonomi dan Bisnis dalam Islam. *AKADEMIKA Volume 9, No. 1*.
- Kuncoro, Mudrajat. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2000). *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Cetakan ke-1, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lubis, Fadhillah. (2015). Prinsip Dasar Muamalah Keuangan Syariah (Maliyah). *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman Vol 1 No 1*.
- Meutia dan Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Volume 8 No. 2*.
- Noviades, Dhils. (2013). Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa bersumber dari APBN.
- Setianingsih, Irma. (2017). Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Melawi. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA) Volume 5, No.3*.

- Singarimbun, Masri. (1995). *Metode Penelitian Survei*. LP3S, Jakarta.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sodiq, Amirus. (2015). Konsep Kesejahteraan dalam Islam. *EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2*.
- Suadi, Amran. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana.
- Sudirman, Wayan. (2014). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke-18, Bandung: CV ALFABETA.
- Sunyoto, Danang. (2013). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Suwandi. (2015). *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*. Cetakan ke-1, Yogyakarta: Deepublish.
- Tangkumahat, Feiby Vencentia, Vicky V.J. Panelewen dan Arie D. P. Mirah. (2017). Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Agri-SosioEkonomi Volume 13 No.2A*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

LAMPIRAN



Lampiran 1

KUESIONER

STUDI PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI *GAMPONG* KUTA BARAT KOTA SABANG

Responden No. :

A. Identitas Pribadi

Nama :

Usia : Tahun

Jenis kelamin : L/P

Pendidikan terakhir :

() SD () SMP () SMA/SMK () D3

() S1 () S2 () S3

Pekerjaan :

Jabatan : Perangkat/masyarakat

Pengalaman menjadi perangkat *gampong* : Tahun

- B. Penelitian ini menginginkan pendapat saudara tentang prinsip pengelolaan dana desa dalam perspektif ekonomi Islam dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Petunjuk pengisian, berilah tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/I, dengan alternatif jawaban sebagai berikut:

1 = Sangat tidak setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5= Sangat setuju (SS)

1. 'Adl

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Distribusi dana desa lebih ditunjukkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.					
2.	Dana desa didistribusikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.					
3.	Pengelolaan dana desa ditempatkan sesuai posisi dan porsinya.					
4.	Dalam pengelolaan dana desa tidak mendzalimi salah satu pihak.					
5.	Masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program ADG					

2. Transparansi

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Pemerintah terbuka dalam pengelolaan keuangan <i>gampong</i> sehinggamasyarakat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan <i>gampong</i> yang jujur					

	dan benar.					
2.	Pemerintah <i>gampong</i> dapat mempertanggungjawabkan secara legal setiap dana desa yang dikelola.					
3.	Dalam pengelolaannya pemerintah <i>gampong</i> melibatkan kelembagaan <i>gampong</i> dan unsur masyarakat <i>gampong</i> .					
4.	Masyarakat percaya sepenuhnya kepada pemerintah <i>gampong</i> dalam mengelola dana desa.					
5.	Akses mengenai pengelolaan keuangan <i>gampong</i> mudah diperoleh.					

3. *Ma'ad*

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Hasil dari pengelolaan dana desa dapat mensejahterakan masyarakat <i>gampong</i> .					
2.	Hasil dari pengelolaan dana desa dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat <i>gampong</i> .					
3.	Hasil dari pengelolaan dana desa dapat dirasakan oleh masyarakat					

	<i>gampong</i> .					
4.	Hasil dari pengelolaan dana desa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat <i>gampong</i> .					
5.	Fasilitas umum yang digunakan masyarakat saat ini adalah hasil dari pengelolaan dana desa					

4. Kesejahteraan Masyarakat

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak dalam proses administrasi di kantor <i>keucik</i> .					
2.	Fasilitas kesehatan <i>gampong</i> memadai.					
3.	Adanya bantuan pendidikan dari pihak <i>gampong</i> .					
4.	Pemerintah <i>gampong</i> memfasilitasi sarana penghubung rehabilitasi rumah penduduk dengan pemerintah daerah.					
5.	Pemerintah <i>gampong</i> mendukung acara-acara adat di <i>gampong</i> .					

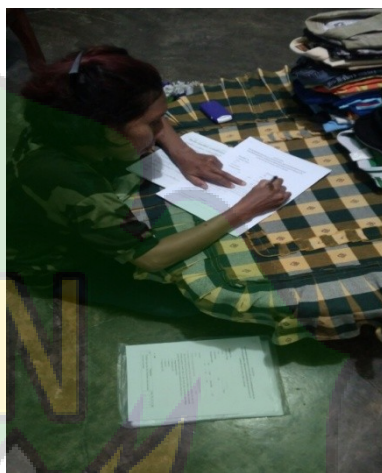
Lampiran 2

Skor Hasil Kuesioner

No	Adl					Transparansi					Ma'ad					Kesejahteraan Masyarakat				
	A1	A2	A3	A4	A5	T1	T2	T3	T4	T5	M1	M2	M3	M4	M5	K1	K2	K3	K4	K5
1	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	3
2	5	4	5	4	4	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4
3	4	4	5	1	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	3	3	1	1	4
4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4
6	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
8	4	5	4	3	2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	2	3	4
9	4	5	4	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4
10	4	3	5	4	5	5	5	5	3	4	5	5	5	4	3	4	3	4	3	5
11	4	4	3	3	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
13	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	2	4	4
14	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
15	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5
16	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5
17	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4
18	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
19	4	4	4	4	3	5	4	5	3	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5
20	4	4	4	4	4	4	4	4	1	2	4	4	4	4	3	4	2	4	3	4
21	4	4	3	3	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5
23	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5
24	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	2	4	4
25	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
26	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5
27	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
28	4	4	4	4	3	5	4	5	3	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	5
29	5	4	4	3	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	2	4	4
30	4	4	4	3	2	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4
31	4	4	4	3	2	4	4	4	3	4	5	4	4	3	4	4	3	2	4	4
32	4	4	4	4	2	3	4	4	3	4	4	4	4	5	4	5	4	3	4	4
33	4	4	4	3	2	5	3	4	3	4	4	4	5	4	4	5	4	2	4	4
34	5	4	4	3	2	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	2	4	4
35	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4
36	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	2	4	4
37	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	2	4	4
38	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
39	5	4	4	4	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
40	5	5	4	5	4	4	5	4	3	5	5	4	4	3	5	3	3	5	4	4
41	5	4	4	4	2	4	4	4	3	4	5	4	5	4	4	4	4	2	4	4
42	4	4	4	3	2	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	2	4	4
43	4	4	4	4	2	4	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
44	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5
45	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	2	4	4
46	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	2	4	4

Lampiran 3

DOKUMENTASI PENELITIAN



Lampiran 4

OUTPUT SPSS

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RA	46	3.00	4.75	3.8750	.51031
RT	46	2.33	5.00	4.0152	.53993
RM	46	3.75	5.00	4.3370	.39517
RK	46	2.40	5.00	3.9783	.49929
Valid N (listwise)	46				

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20-30	18	39.1	39.1	39.1
31-40	9	19.6	19.6	58.7
41-50	9	19.6	19.6	78.3
> 50	10	21.7	21.7	100.0
Total	46	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	29	63.0	63.0	63.0
Perempuan	17	37.0	37.0	100.0
Total	46	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D1	1	2.2	2.2	2.2
	D3	5	10.9	10.9	13.0
	S1	8	17.4	17.4	30.4
	S2	1	2.2	2.2	32.6
	SD	1	2.2	2.2	34.8
	SMA/Sederajat	28	60.9	60.9	95.7
	SMP	2	4.3	4.3	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruh	4	8.7	8.7	8.7
	Ibu Rumah Tangga	8	17.4	17.4	26.1
	Nelayan	1	2.2	2.2	28.3
	Pegawai (BPKS)	1	2.2	2.2	30.4
	Pensiunan	3	6.5	6.5	37.0
	PNS	3	6.5	6.5	43.5
	Wiraswasta	26	56.5	56.5	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

Pengalaman Menjadi Perangkat Gampong

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 tahun	1	2.2	2.2	2.2
	10 tahun	2	4.3	4.3	6.5

12 tahun	1	2.2	2.2	8.7
15 tahun	1	2.2	2.2	10.9
2 tahun	4	8.7	8.7	19.6
6 tahun	1	2.2	2.2	21.7
8 tahun	2	4.3	4.3	26.1
9 tahun	2	4.3	4.3	30.4
Tidak Pernah	32	69.6	69.6	100.0
Total	46	100.0	100.0	

A1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	33	71.7	71.7	71.7
	Sangat Setuju	13	28.3	28.3	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

A3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	2	4.3	4.3	4.3
	Setuju	33	71.7	71.7	76.1
	Sangat Setuju	11	23.9	23.9	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

A4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	2.2	2.2	2.2

Netral	11	23.9	23.9	26.1
Setuju	29	63.0	63.0	89.1
Sangat Setuju	5	10.9	10.9	100.0
Total	46	100.0	100.0	

A5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	16	34.8	34.8	34.8
Netral	9	19.6	19.6	54.3
Setuju	16	34.8	34.8	89.1
Sangat Setuju	5	10.9	10.9	100.0
Total	46	100.0	100.0	

T1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	1	2.2	2.2	2.2
Setuju	28	60.9	60.9	63.0
Sangat Setuju	17	37.0	37.0	100.0
Total	46	100.0	100.0	

T4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	2.2	2.2	2.2
Tidak Setuju	3	6.5	6.5	8.7
Netral	16	34.8	34.8	43.5

Setuju	17	37.0	37.0	80.4
Sangat Setuju	9	19.6	19.6	100.0
Total	46	100.0	100.0	

M1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	22	47.8	47.8	47.8
Sangat Setuju	24	52.2	52.2	100.0
Total	46	100.0	100.0	

M2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	31	67.4	67.4	67.4
Sangat Setuju	15	32.6	32.6	100.0
Total	46	100.0	100.0	

M3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	2	4.3	4.3	4.3
Setuju	24	52.2	52.2	56.5
Sangat Setuju	20	43.5	43.5	100.0
Total	46	100.0	100.0	

M5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	3	6.5	6.5	6.5

Setuju	35	76.1	76.1	82.6
Sangat Setuju	8	17.4	17.4	100.0
Total	46	100.0	100.0	

K1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Netral	1	2.2	2.2	2.2
Setuju	26	56.5	56.5	58.7
Sangat Setuju	19	41.3	41.3	100.0
Total	46	100.0	100.0	

K2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	1	2.2	2.2	2.2
Netral	4	8.7	8.7	10.9
Setuju	33	71.7	71.7	82.6
Sangat Setuju	8	17.4	17.4	100.0
Total	46	100.0	100.0	

K3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	2.2	2.2	2.2
Tidak Setuju	19	41.3	41.3	43.5
Netral	6	13.0	13.0	56.5
Setuju	15	32.6	32.6	89.1

	Sangat Setuju	5	10.9	10.9	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

K4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	2.2	2.2	2.2
	Netral	3	6.5	6.5	8.7
	Setuju	29	63.0	63.0	71.7
	Sangat Setuju	13	28.3	28.3	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

K5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Netral	1	2.2	2.2	2.2
	Setuju	34	73.9	73.9	76.1
	Sangat Setuju	11	23.9	23.9	100.0
	Total	46	100.0	100.0	

Uji Validitas dan Reliabilitas ‘Adl (X1)

Correlations

		A1	A3	A4	A5	TA
A1	Pearson Correlation	1	.533**	.309	.333	.634**
	Sig. (2-tailed)		.000	.037	.024	.000
	N	46	46	46	46	46
A3	Pearson Correlation	.533**	1	.295	.636**	.795**

	Sig. (2-tailed)	.000		.047	.000	.000
	N	46	46	46	46	46
A4	Pearson Correlation	.309	.295	1	.293	.644
	Sig. (2-tailed)	.037	.047		.048	.000
	N	46	46	46	46	46
A5	Pearson Correlation	.333	.636	.293	1	.848
	Sig. (2-tailed)	.024	.000	.048		.000
	N	46	46	46	46	46
TA	Pearson Correlation	.634	.795	.644	.848	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	46	46	46	46	46

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.668	4

Uji Validitas dan Reliabilitas Transparansi (X2)

Correlations

		T1	T4	T5	TT
T1	Pearson Correlation	1	.337	.519	.713
	Sig. (2-tailed)		.022	.000	.000
	N	46	46	46	46
T4	Pearson Correlation	.337	1	.382	.836
	Sig. (2-tailed)	.022		.009	.000
	N	46	46	46	46
T5	Pearson Correlation	.519	.382	1	.760
	Sig. (2-tailed)	.000	.009		.000
	N	46	46	46	46

TT	Pearson Correlation	.713**	.836**	.760**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	46	46	46	46

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.625	3

Uji Validitas dan Reliabilitas *Ma'ad* (X3)

Correlations

		M1	M2	M3	M5	TM
M1	Pearson Correlation	1	.666	.428	.310	.770
	Sig. (2-tailed)		.000	.003	.036	.000
	N	46	46	46	46	46
M2	Pearson Correlation	.666	1	.580	.425	.854
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.003	.000
	N	46	46	46	46	46
M3	Pearson Correlation	.428	.580	1	.403	.798
	Sig. (2-tailed)	.003	.000		.005	.000
	N	46	46	46	46	46
M5	Pearson Correlation	.310	.425	.403	1	.678
	Sig. (2-tailed)	.036	.003	.005		.000
	N	46	46	46	46	46
TM	Pearson Correlation	.770	.854	.798	.678	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	

N	46	46	46	46	46
---	----	----	----	----	----

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.776	4

Uji Validitas dan Reliabilitas Kesejahteraan Masyarakat (Y)

		Correlations					
		K1	K2	K3	K4	K5	TK
K1	Pearson Correlation	1	.224	.455**	.696**	.451**	.762**
	Sig. (2-tailed)		.134	.001	.000	.002	.000
	N	46	46	46	46	46	46
K2	Pearson Correlation	.224	1	.093	.446**	.045	.467**
	Sig. (2-tailed)	.134		.537	.002	.765	.001
	N	46	46	46	46	46	46
K3	Pearson Correlation	.455**	.093	1	.522**	.384**	.798**
	Sig. (2-tailed)	.001	.537		.000	.008	.000
	N	46	46	46	46	46	46
K4	Pearson Correlation	.696**	.446**	.522**	1	.422**	.864**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000		.003	.000
	N	46	46	46	46	46	46
K5	Pearson Correlation	.451**	.045	.384**	.422**	1	.592**
	Sig. (2-tailed)	.002	.765	.008	.003		.000
	N	46	46	46	46	46	46
TK	Pearson Correlation	.762**	.467**	.798**	.864**	.592**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000	
	N	46	46	46	46	46	46

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.714	5

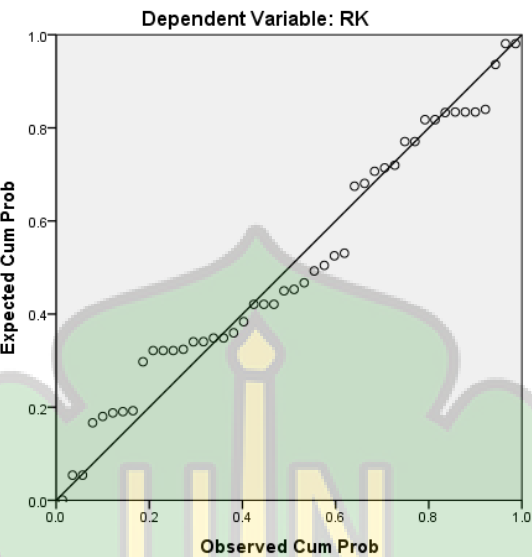
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

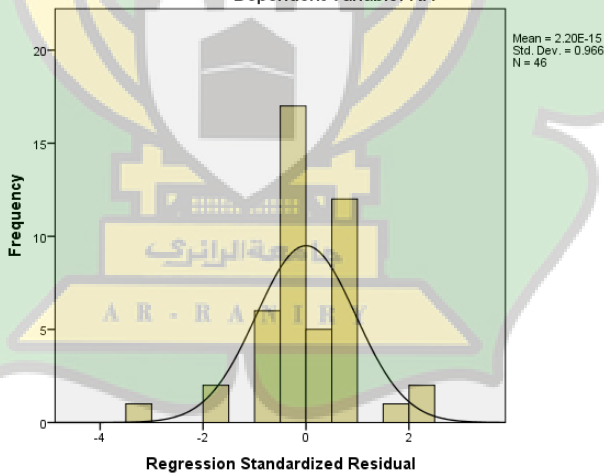
		Unstandardized Residual
N		46
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.41439522
Most Extreme Differences	Absolute	.120
	Positive	.099
	Negative	-.120
Test Statistic		.120
Asymp. Sig. (2-tailed)		.094 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Histogram
Dependent Variable: RK



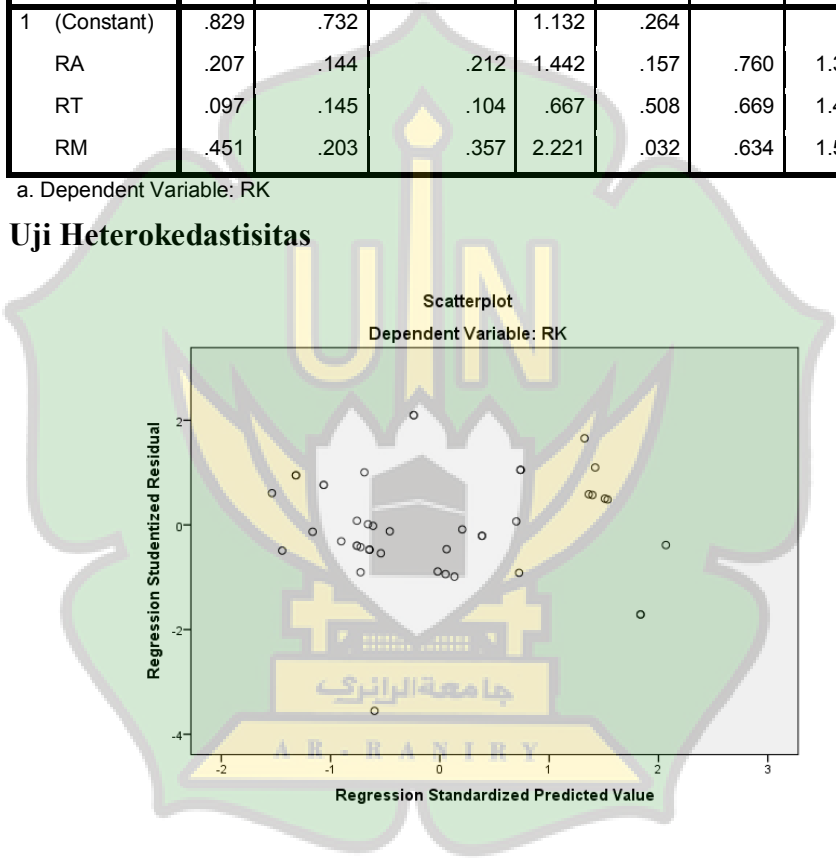
Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.829	.732		1.132	.264		
RA	.207	.144	.212	1.442	.157	.760	1.316
RT	.097	.145	.104	.667	.508	.669	1.495
RM	.451	.203	.357	2.221	.032	.634	1.578

a. Dependent Variable: RK

Uji Heterokedastisitas



Uji Parsial (Uji T)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.829	.732		1.132	.264		
RA	.207	.144	.212	1.442	.157	.760	1.316
RT	.097	.145	.104	.667	.508	.669	1.495
RM	.451	.203	.357	2.221	.032	.634	1.578

a. Dependent Variable: RK

Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.491	3	1.164	6.324	.001 ^b
	Residual	7.728	42	.184		
	Total	11.218	45			

a. Dependent Variable: RK

b. Predictors: (Constant), RM, RA, RT

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.558 ^a	.311	.262	.42894

a. Predictors: (Constant), RM, RA, RT

b. Dependent Variable: RK